

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG),
PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* (CSR) TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dalam
Sektor Pertambangan Tahun 2014-2020)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi



Oleh:

**KHADIJAH KHUSNUL MUTHMAINNAH NURDIN
1601035097
S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG),
Pertumbuhan Penjualan, dan *Corporate Social
Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance* (Studi
Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dalam
Sektor Pertambangan Tahun 2014-2020)

Nama Mahasiswa : Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin

NIM : 1601035097

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 24 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19670516 199802 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. H. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 9 Februari 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG),
Pertumbuhan Penjualan, dan *Corporate Social
Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance* (Studi
Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dalam
Sektor Pertambangan Tahun 2014-2020)




Nama : Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin

NIM : 1601035097

Hari : Kamis

Tanggal Ujian : 9 Februari 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA 1
NIP. 19670516 199802 1 001 
2. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFA., CIQaR 2
NIP. 19801224 200801 1 006 
3. Ferry Diyanti, S.E., M.SA., Ak., CA., CSRS., CSRA 3
NIP. 19830228 200604 2 002 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 11 November 2022



SEKOLAH TINGGI ILMU SAMPUNG
100
R. METERAI
TEMPEL
0646EAKX282525369

Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

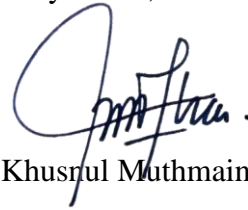
Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin
NIM : 1601035097
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Pertumbuhan Penjualan, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dalam Sektor Pertambangan Tahun 2014-2020)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 24 Februari 2023
Yang menyatakan,



Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin

ABSTRAK

Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin, **Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2020**. Dibimbing oleh Bapak Iskandar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI dalam sektor pertambangan tahun 2014-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 perusahaan dengan penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 data amatan. Jenis data adalah data sekunder yang dianalisis dengan analisis regresi linear berganda yang dibantu menggunakan alat analisis IBM SPSS *Statistics 23*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*; 2) Komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*; 3) Kualitas audit berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*; 4) Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*; 5) *Corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, *Good Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit, Pertumbuhan Penjualan, *Corporate Social Responsibility*.

ABSTRACT

Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin, The Effect of Good Corporate Governance, Sales Growth, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Mining Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2020 period. Supervised by Mr. Iskandar. This study aims to examine the effect of institutional ownership, audit committee, audit quality, sales growth, and corporate social responsibility on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2020 period. The population in this study were 52 companies with the determination of the sample using purposive sampling method so that the number of samples in this study amounted to 63 observational data. The type of data is secondary data which is analyzed by multiple linear regression analysis and moderated regression analysis assisted using the IBM SPSS Statistics 23 analysis tool. Based on the results of the tests that have been carried out, it shows that: 1) Institutional ownership has a significant effect and negative on tax avoidance; 2) Audit committee has a significant effect and positive on tax avoidance; 3) Audit quality has a insignificant effect and positive on tax avoidance; 4) Sales growth has a significant effect and positive on tax avoidance; 5) corporate social responsibility has a significant effect and negative on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Good Corporate Governance, Institutional Ownership, Audit Committee, Audit Quality, Sales Growth, Corporate Social Responsibility.*

RIWAYAT HIDUP



Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin, lahir pada tanggal 10 Januari 1999 di Kota Balikpapan. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Ir. Nurdin Ismail dan Ibu Radhiyah Amin, S.Ag. Memulai Pendidikan Sekolah Dasar di MI Sentra Cendekia Muslim Balikpapan dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 14 Balikpapan dan lulus tahun 2013, dan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Balikpapan jurusan Akuntansi dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2016.

Penulis melanjutkan lagi pendidikan nya ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2016, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman dengan mengambil program studi S1 Akuntansi. Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN Reguler) di Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, serta junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan hingga akhir zaman, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawaman.
5. Bapak Dr. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Iqbal, SE., M.SA., CSRA., CSP selaku dosen wali saya selama menjalani masa studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staf Jurusan Akuntansi, Akademik dan Tata Usaha yang telah membantu dalam proses administrasi perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya tersayang Ayahanda Ir. Nurdin Ismail dan Ibunda Radhiyah Amin, S.Ag yang tiada hentinya memberikan dukungan doa, motivasi, materi dan non materi yang telah diberikan selama ini.
10. Kedua adik saya tersayang Faiz dan Fakhry serta seluruh keluarga besar yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan support, doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Untuk sahabat-sahabat saya, Dinar Asmaradani, Rezky Damayanti, Devi Akriani, dan Rakita Septi Ampuni terimakasih atas segala doa dan bantuannya sejak awal perkuliahan, susah senang berkuliah di rantauan kita jalani bersama.
12. Untuk teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik selama kepengurusan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi khususnya periode 2016, 2017, 2018, 2019 terimakasih atas segala dukungan, bantuan dan kerja samanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 11 November 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin'.

Khadijah Khusnul Muthmainnah Nurdin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	14
2.1.2 Teori Legitimasi	16
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	18
2.1.4 Kepemilikan Institusional	19
2.1.5 Komite Audit	19
2.1.6 Kualitas Audit	20
2.1.7 Pertumbuhan Penjualan	21
2.1.8 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	21
2.1.9 <i>Tax Avoidance</i>	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Pengembangan Hipotesis	32
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35
2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	36
2.4.5 Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	37
2.5 Model Penelitian	39

BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Definisi Operasional	40
3.1.1 Definisi <i>Tax Avoidance</i>	40
3.1.2 Definisi Kepemilikan Institusional.....	40
3.1.3 Definisi Komite Audit.....	41
3.1.4 Definisi Kualitas Audit	41
3.1.5 Definisi Pertumbuhan Penjualan	42
3.1.6 Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	42
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.3.1 Jenis Data	44
3.3.2 Sumber Data.....	45
3.4 Metode Pengumpulan Data	45
3.5 Analisis Data	45
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	45
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	46
3.5.2.1 Uji Multikolinearitas.....	46
3.5.2.2 Uji Normalitas	47
3.5.2.3 Uji Autokorelasi.....	47
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas	47
3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda.....	48
3.5.4 Uji Kelayakan Model	49
3.5.4.1 Uji Koefisien Korelasi (R).....	49
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
3.5.4.3 Uji F	50
3.5.5 Uji Hipotesis.....	50
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.2 Analisis Data	53
4.2.1 Analisis Deskriptif.....	53
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	56
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas.....	56
4.2.2.2 Uji Normalitas	57
4.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	58
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas	59
4.2.3 Uji Regresi Linear Berganda.....	60
4.2.4 Uji Kelayakan Model	62
4.2.4.1 Uji Koefisien Korelasi (R).....	62
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.2.4.3 Uji F	63
4.2.5 Uji Hipotesis.....	64
4.2.5.1 Pengujian Hipotesis 1	65
4.2.5.2 Pengujian Hipotesis 2	65
4.2.5.3 Pengujian Hipotesis 3	66

4.2.5.4	Pengujian Hipotesis 4	66
4.2.5.5	Pengujian Hipotesis 5	66
4.3	Pembahasan.....	67
4.3.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	67
4.3.2	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	69
4.3.3	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	71
4.3.4	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ..	73
4.3.5	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	75
BAB V	PENUTUP.....	78
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 dan 2018	2
Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017	2
Tabel 1. 3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2010-2019	3
Tabel 1. 4 <i>Tax Ratio</i> Sektor Pertambangan Minerba Tahun 2015-2018.....	4
Tabel 1. 5 Jumlah IUPK Menurut Status Pembayaran Pajak Tahun 2014	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Teknik Pengumpulan Sampel	44
Tabel 4. 1 Uji Analisis Deskriptif	54
Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4. 3 Uji Normalitas	58
Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi.....	58
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4. 6 Uji Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4. 7 Uji Koefisien Korelasi (R)	62
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
Tabel 4. 9 Uji F	64
Tabel 4. 10 Uji Hipotesis	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 2. 2 Model Penelitian	39

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BEI	Bursa Efek Indonesia
BAPEPAM	Badan Pengawas Pasar Modal
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
CSRI	<i>Corporate Social Responsibility Index</i>
DW	<i>Durbin Watson</i>
DU	<i>Durbin Upper</i>
DL	<i>Durbin Lower</i>
ETR	<i>Effective Tax Rate</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GRI	<i>Global Reporting Initiative</i>
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
KAP	Kantor Akuntan Publik
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
VIF	<i>Variance Inflation Factor</i>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Objek Penelitian.....	86
Lampiran 2. Lembar Pengukuran CSR Indeks GRI G4 91 Item.....	87
Lampiran 3. Lembar Pengukuran CSR Indeks GRI <i>Standars</i> (2016).....	93
Lampiran 4. Tabulasi Data Penelitian.....	97
Lampiran 5. Output Hasil Analisis SPSS versi 23.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam membangun, mendukung jalannya pemerintahan, dan yang terpenting untuk menjaga kestabilan perekonomian negara.

Menteri Keuangan mengatakan pajak merupakan tulang punggung nasional (Kemenkeu, 2016). Terbukti dari sekitar 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Menjadi sebagai salah satu sektor penting dalam mendukung kemandirian finansial negara dan bahkan kontribusinya yang paling dominan, mengartikan bahwa jatuh bangunnya suatu negara sangat bergantung pada pengumpulan pajaknya. Untuk itu, penentuan pencapaian penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Gazali et al., 2020).

Berdasarkan situs berita CNBC (2020), perkembangan penerimaan pajak di tahun 2019 masih belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 dan 2018

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	Persentase
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.332,1	84,4 %
2018	Rp 1.424	Rp 1.315,9	92,41%

Sumber: www.cnbcindonesia.com, 2020

Sesuai pada tabel di atas, yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak tahun 2019 hanya dapat terealisasi 84,4% dari target APBN yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, terdapat kekurangan penerimaan pajak dan tidak terpenuhinya target yang mencapai Rp 245,5 triliun. Pencapaian angka tersebut, menggambarkan adanya selisih yang lebih besar dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2017.

Fenomena tidak tercapainya target penerimaan dari sektor pajak ini rupanya merupakan hal yang terus terulang dari tahun ke tahun. Pajakku (2019), melaporkan data penerimaan pajak dari tahun ke tahun angkanya yang cenderung luput dari yang telah ditargetkan. Sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	Persentase
2014	Rp 1.072	Rp 985	91,9%
2015	Rp 1.294	Rp 1.055	81,5%
2016	Rp 1.539	Rp 1.283	83,4%
2017	Rp 1.283	Rp 1.147	89,4%

Sumber: www.pajakku.com, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa besarnya penerimaan pajak negara tiap tahunnya dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tidak pernah memenuhi target.

Dikutip dari situs berita MUC Global (2020), bahwa realisasi penerimaan pajak 2019 tercatat sebagai pertumbuhan terendah dalam 10 tahun terakhir, yaitu

hanya sebesar 1,4%. Adapun data pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2010-2019

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan (%)	13,90	19,76	12,53	10,24	6,92	7,69	4,25	4,07	14,33	1,43

Sumber: www.mucglobal.com, 2020

Berdasarkan pada Tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, pertumbuhan penerimaan pajak terus mengalami fluktuasi dan puncaknya terdapat kemerosotan nilai pertumbuhan realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 yang angkanya tercatat terendah sepanjang 10 tahun terakhir ini, yaitu di angka 1,43%. Diterangkan lebih lanjut, data penerimaan pajak per sektor di tahun tersebut menunjukkan terdapat kontraksi di sektor pertambangan, yang mana tumbuh negatif sebesar -19,07%. Hal ini membuktikan bahwa kontraksi atau penurunan yang dikontribusikan oleh sektor pertambangan cukup memberikan dampak pada penerimaan pajak negara.

Pertambangan sebagai sektor yang menghasilkan nilai ekonomi yang besar dan fantastis rupanya belum tercermin dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dikutip dari penelitian Gazali et al. (2020), *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang berasal dari data Kementerian Keuangan menunjukkan dari tahun ke tahun juga cukup berfluktuatif dan tergolong rendah, terlihat dari tahun 2015 sampai tahun 2018 berdasarkan data yang dihimpun, sebagai berikut:

Tabel 1. 4 *Tax Ratio* Sektor Pertambangan Minerba Tahun 2015-2018

Keterangan	2015	2016	2017	2018
<i>Tax Ratio</i> (minerba)	4,7%	3,9%	4,3%	4,95%

Sumber: *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* (Gazali et.al, 2020)

Pada tahun 2014, berdasarkan situs berita Katadata (2019), Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan jumlah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut status pembayaran pajak. Adapun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 5 Jumlah IUPK Menurut Status Pembayaran Pajak Tahun 2014

Keterangan	IUPK yang diterbitkan	IUPK yang aktif beroperasi	IUPK yang ber-NPWP	IUPK yang tidak ber-NPWP	IUPK yang melaporkan SPT
Jumlah	10.922	7.834	5.984	1.850	3.276

Sumber: *databoks.katadata.co.id*, 2019

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas, dapat dilihat bahwa dari sebanyak 10.922 jumlah IUPK yang telah diterbitkan, hanya sejumlah 7.834 pemilik IUPK yang aktif beroperasi. Dari pemegang IUPK yang aktif beroperasi tersebut, hanya 5.984 IUPK yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sisanya sebanyak 1.850 (24%) IUPK tidak memiliki NPWP dan tentunya tidak melakukan pembayaran pajak. Adapun pemegang izin tambang khusus yang memiliki NPWP dan melaporkan SPT hanya 42% atau 3.276 IUPK, sisanya tidak melaporkan SPT pajak. Hal ini membuktikan masih rendahnya kepatuhan perusahaan tambang dalam hal perpajakan.

Di tahun 2014, sekitar 64 perusahaan pemegang izin usaha tambang di Maluku Utara tidak memiliki NPWP dan menunggak pembayaran pajak (Tempo.co, 2014). Dalam program *tax amnesty* yang diadakan pemerintah guna menggenjot penerimaan pajak, partisipasi dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pun juga masih tergolong rendah, di tahun 2016 dilaporkan hanya 967 Wajib Pajak dari total 6.001 Wajib Pajak minerba yang ikut serta dalam *tax amnesty*, dengan total tebusan sebesar Rp 221 miliar. Berdasarkan

fenomena-fenomena di atas, tentunya sangat berdampak pada penerimaan negara dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya praktik penghindaran pajak.

Sesuai prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan di negara ini yaitu prinsip *self assessment*, dimana penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan penuh kepada Wajib Pajak. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan menganggap bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Tujuan perusahaan tentunya yaitu memaksimalkan laba. Kenyataannya, jika semakin besar laba yang dihasilkan maka besar pula nilai beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Dilema yang dialami pihak manajemen perusahaan inilah yang kemudian mendorong adanya praktik perencanaan pajak yang bertujuan mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Pihak manajemen perusahaan akan mencoba memutar otak agar dapat menghindari pajak. Terdapat berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak, baik yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Annisa & Kurniasih, 2012).

Menurut Sandy & Lukviarman (2015), *tax avoidance* adalah tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Usaha-usaha dalam mengurangi beban pajak ini dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan

yang legal, atau sebagai kegiatan yang ilegal jika transaksinya hanya bertujuan untuk penghindaran pajak dan tidak melakukan usaha yang baik dan dengan cara yang menyalahi undang-undang. Tentunya terdapat risiko yang akan dimunculkan bagi perusahaan dari aktivitas *tax avoidance* yang dilakukannya antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Annisa & Kurniasih, 2012).

Kecenderungan risiko yang dapat berdampak merugikan pemegang saham atas tindakan *tax avoidance*, membuat diperlukannya mekanisme yang tepat untuk mengendalikan akibat dari keputusan manajemen dalam melakukan praktik ini. Untuk itu, diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). *Corporate governance* memiliki andil dalam mengendalikan keputusan pihak pengelola. Oleh karena itu, penerapan GCG dapat mendorong kepatuhan manajemen dalam pembayaran pajak.

Mekanisme-mekanisme yang terdapat dalam GCG apabila diterapkan dengan baik oleh perusahaan maka dapat meningkatkan transparansi dan menekan praktik kecurangan yang kemungkinan dilakukan perusahaan sehingga dapat meminimalkan risiko kepada pemegang saham. Menurut Fadhilah (2014), pada GCG terdapat dua mekanisme pengawasan yaitu adanya mekanisme bersifat internal dan juga eksternal. Pada penelitian ini, mekanisme pengawasan GCG lebih difokuskan pada mekanisme eksternal yaitu pengendalian atau pengawasan terhadap perusahaan dari pihak luar.

Salah satunya dapat dilihat melalui penerapan mekanisme GCG yaitu kepemilikan institusional. Investor institusional yang termasuk di dalamnya

pemerintah dapat mengawasi kinerja manajer dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan dan tentunya tidak mengharapkan adanya penghindaran pajak yang akan dilakukan pihak perusahaan.

Selanjutnya, dalam penerapan *corporate governance* terdapat salah satu bagian perusahaan yang mutlak harus ada yaitu komite audit. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan, perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan usaha dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap konflik kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Fadhilah, 2014). Komite audit juga direfeksikan sebagai sistem monitoring yang juga mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan (Damayanti & Susanto, 2015).

GCG dipandang sebagai sebuah sistem yang dijalankan perusahaan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Transparansi yang lemah mengakibatkan perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik (Fadhilah, 2014). Informasi keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang berkualitas dipercaya akan menampilkan informasi perusahaan yang sebenarnya dan lebih akurat. Apabila kualitas audit baik, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin kecil.

Kehadiran dan penerapan *corporate governance* yang baik akan menunjang aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini pengaruh *good corporate governance* akan dilihat menggunakan variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit. Sejumlah penelitian *good corporate*

governance terhadap *tax avoidance* telah banyak dikaji dalam beberapa tahun terakhir ini dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Keberadaan variabel kepemilikan institusional, komite audit, maupun kualitas audit menunjukkan hasil yang kontradiktif pada setiap penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), Maraya & Yendrawati (2016), dan Payanti & Jati (2020) menemukan bukti adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019). Selain itu, komite audit juga menunjukkan hasil yang berbeda antar penelitian. Penelitian Fadhilah (2014) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Pitaloka & Merkusyawati (2019) menunjukkan hasil sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rombebunga & Pesudo (2019) justru tidak menemukan bukti adanya pengaruh antara kepemilikan institusional maupun komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian kualitas audit terhadap *tax avoidance* sebelumnya telah dilakukan oleh Sunarsih & Oktavia (2016) dan Sandy & Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan hasil penelitian Rombebunga & Pesudo (2019) yang menemukan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Maraya & Yendrawati (2016) mengungkapkan bahwa salah satu bentuk lain implementasi dari konsep *good corporate governance*, ialah penerapan *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan praktik yang mengintegrasikan

penyampaian aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan tentunya akan berusaha melakukan berbagai kegiatan CSR untuk mendapat legitimasi dari masyarakat demi kelangsungan hidup perusahaan.

Pajak dan CSR dalam hal ini memiliki kesamaan yaitu memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat (Wiguna & Jati, 2017). Salah satu kontribusi kepada masyarakat yaitu melalui pajak pemerintah. Perusahaan yang sadar akan pentingnya aktivitas CSR demi kelangsungan usahanya maka tentunya juga mengerti dan sadar akan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Dengan perusahaan melakukan penghindaran pajak maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial dan akan mengakibatkan perusahaan tersebut kehilangan legitimasinya di mata stakeholder.

Hal ini memberikan pandangan bahwa perusahaan dengan aktivitas CSR yang rendah dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial dan memungkinkan untuk menghindari pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Noviari (2017) serta Januari & Suardhika (2019), juga mendapatkan hasil yang serupa yaitu adanya hubungan negatif antara CSR dengan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maraya & Yendrawati (2016), yang memperoleh hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Payanti & Jati (2020) memperoleh hasil bahwa CSR tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* selain GCG dan CSR ialah pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat menerima gambaran baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan, serta menaksir seberapa besar profit yang akan diperoleh perusahaan, dari besarnya *sales growth*. Menurut Dewinta & Setiawan (2016) pertumbuhan penjualan yang meningkat, cenderung perusahaan akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan lebih mengarah untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Januari & Suardhika (2019) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR) yang digunakan sebagai pengukuran *tax avoidance*. Penelitian lain terkait dengan pertumbuhan penjualan juga telah dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang menyatakan hasil yang berbeda bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Mahanani et al. (2017) membuktikan bahwa *sales growth* justru tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Masih beragamnya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Peneliti, menggunakan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek yang akan diteliti dikarenakan perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak ilegal maupun legal (Solihah et al., 2020). Perusahaan tambang juga memiliki struktur pencatatan akuntansi yang lebih kompleks sehingga pihak-pihak pengelola perusahaan dapat memanfaatkan celah tersebut (Rombebunga & Pesudo, 2019).

Mengingat kegiatan usahanya yang sangat berkaitan dengan sumber daya alam, kewajiban pelaksanaan CSR terhadap perusahaan pertambangan telah dikhususkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan sumbangan ilmu untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan *good corporate governance*, pertumbuhan penjualan, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan agar lebih bijak dalam melakukan *tax avoidance* dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak yang dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan dalam menilai kecenderungan *tax avoidance* yang dilakukan oleh masing-

masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

3. Manfaat Regulasi/ Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam perumusan dan pengambilan kebijakan di bidang perpajakan pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mendeskripsikan hubungan antara *principal* dan *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) menyatakan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan keagenan ini menjelaskan adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Adanya konflik kepentingan dalam perusahaan antara *shareholder* dan manajer, yang melatarbelakangi adanya masalah agensi. Sebagai *agent*, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun di pihak lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sehingga adanya kemungkinan *agent* bertindak tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan yang terbaik bagi *principal*. Masalah yang timbul ini biasa disebut sebagai *agency problem* atau masalah agensi (Jensen & Meckling, 1976).

Masalah agensi diawali dari adanya ketidakseimbangan luasnya informasi antara *agent* dengan *principal*. Dimana kondisi ini disebut asimetri informasi (Rusydi & Martani, 2014). Manajer sebagai pengelola perusahaan, lebih banyak mengetahui informasi (*full information*) internal dan juga *going concern*

perusahaan dibandingkan pemilik atau investor. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dibanding pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik yaitu memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya.

Menurut Lisa (2012), informasi lebih sedikit yang dimiliki pihak *principal* atau pemegang saham, membuatnya sulit untuk mengendalikan berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Akibatnya, terkadang terdapat kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan pihak manajemen yang luput diketahui oleh pihak *principal* demi memuaskan kepentingannya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran pihak pemegang saham yaitu aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang akan dilakukan oleh pihak manajemen.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajer sebagai bentuk sikap oportunistik demi mencapai tujuan keuntungan jangka pendek, sangat memungkinkan dapat merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick & Noga, 2010). Menurut Fisher (2014), praktik yang tidak bertanggung jawab seperti penghindaran pajak berpotensi merugikan perusahaan dan pemegang saham dengan merusak reputasi perusahaan dan menghambat upaya *branding*-nya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penerapan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik (Dewi, 2019).

Corporate governance berfungsi untuk mengendalikan berbagai kemungkinan yang akan terjadi akibat dari permasalahan agensi dalam praktik penghindaran pajak (Rombebunga & Pesudo, 2019). Penerapan *corporate*

governance yang baik dalam perusahaan dapat menekan ketimpangan luasnya informasi yang dimiliki (asimetri informasi) antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen. *Corporate governance* dapat menjadi sebuah sistem, prosedur, dan aturan yang menciptakan informasi keuangan disajikan dengan transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, dan adil (Pratiwi et al., 2015).

Di samping itu juga, manajemen sebagai pihak pengelola yang memiliki informasi lebih luas bisa mengetahui pertumbuhan penjualan (*sales growth*) perusahaan. Dari pertumbuhan penjualan ini, manajer bisa melihat tingkat profit yang nantinya akan diperoleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat tentunya akan menghasilkan laba yang tinggi, yang bermuara pada nilai beban pajak yang akan tinggi juga tentunya. Hal ini yang mendorong pihak pengelola perusahaan (*manager*) demi kepentingannya, lalu melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan tujuan beban pajak yang dibayarkan tetap rendah.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang bersumber dari adanya interaksi sosial antara sebuah perusahaan dengan masyarakat. Berdasarkan teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat (Ratmono & Winarti, 2015). Untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya perusahaan membutuhkan legitimasi dari lingkungan tempatnya beroperasi. Perusahaan sadar akan keberlangsungan hidupnya berhubungan juga dengan citra perusahaan di mata masyarakat untuk *going concern* perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016).

Salah satu usaha untuk memperoleh citra perusahaan yang baik di mata perusahaan yaitu dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Ratmono & Winarti (2015), perusahaan berusaha menunjukkan kepada publik telah melakukan banyak aktivitas CSR demi meraih citra yang baik yaitu dengan mengungkapkan informasi CSR di laporan tahunannya. Perusahaan berharap dengan semakin tinggi aktivitas CSR yang dilakukan dapat memenuhi harapan dan semakin tinggi memperoleh legitimasi di lingkungan sosial masyarakat. Pajak dan CSR perihal ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama berkontribusi pada masyarakat dan merupakan kewajiban perusahaan.

Menurut Payanti & Jati (2020) teori legitimasi menyebutkan, perusahaan yang sadar akan tanggung jawab sosialnya dan sadar akan pentingnya membangun hubungan dengan masyarakat akan menjalankan perusahaan sesuai dengan norma sosial yang berlaku, serta menjamin perusahaan untuk terus mendapatkan pengakuan dan citra positif dari masyarakat. Untuk mewujudkan itu, perusahaan bisa menunjukkan usahanya dengan cara bertanggung jawab sosial kepada masyarakat yaitu melalui pemerintah dengan cara membayar pajak dengan penuh dan tidak melakukan usaha untuk menghindari pajak atau *tax avoidance*.

Dalam hal ini, semakin banyak aktivitas - aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan sebagaimana bentuk usaha pertanggungjawaban sosialnya atas aktivitas operasinya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat menunjukkan pula besarnya rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dan dapat dicerminkan dengan kepatuhan perusahaan dalam urusan perpajakannya dan tidak melakukan

tindakan *tax avoidance*. Teori legitimasi inilah yang kemudian melatarbelakangi keterkaitan CSR dengan *tax avoidance*.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Kekhawatiran akan kerap adanya risiko dari akibat masalah agensi (*agency problem*) pada setiap perusahaan mendorong terciptanya *good corporate governance*. GCG didefinisikan oleh *Indonesian institute for Corporate Governance* (IICG) sebagai suatu sistem, struktur, dan proses yang dijalankan oleh bagian-bagian perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan demi keberlangsungan hidup perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*, dan berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan norma yang ada. GCG memiliki pengaruh besar dalam menentukan *goals* perusahaan dan cara apa yang digunakan untuk mencapainya, serta mengantisipasi risiko yang akan mungkin terjadi.

Berdasarkan standar Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG), dalam *good corporate governance* sendiri terdapat lima prinsip utama yang harus ada ketika mengaplikasikannya yaitu *accountability, transparency, responsibility, fairness, dan independency*. Untuk mengimplementasikannya, mekanisme pengawasan oleh GCG sendiri dibagi menjadi dua yaitu ada mekanisme internal dan mekanisme dari eksternal (Fadhilah, 2014). Masing-masing saling berintegrasi untuk mengintensifkan transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan kinerja perusahaan. Pada penelitian ini, mekanisme GCG akan dilihat melalui variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional pada perusahaan merupakan salah satu bentuk pengawasan dari mekanisme penerapan GCG agar dapat mengoptimalkan kinerja manajemen. Secara teknis, fungsi monitoring lebih efektif dijalankan oleh kepemilikan institusional dibandingkan kepemilikan manajerial (Diantari & Ulupui, 2016). Lebih lanjut Sandy & Lukviarman (2015) menjelaskan, tingginya tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan akan membuat manajer merasa kinerjanya terawasi, untuk itu akan mendorong manajer tidak bersifat oportunis dan lebih bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Kepemilikan institusional sendiri merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, serta institusi dan lembaga lainnya (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Tidak termasuk kepemilikan investor yang sifatnya individu. Besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki pihak institusional akan menentukan juga seberapa besar tingkat pengawasan dan kemampuan monitor yang akan diberikan.

2.1.5 Komite Audit

Komite audit merupakan suatu unsur penting yang harus ada dalam perusahaan ketika menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Komite audit ini beranggotakan paling sedikit tiga orang (termasuk ketua) dan diketuai oleh komisaris independen. Dalam hal ini komite audit dan dewan komisaris, keduanya saling bersinergi untuk melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan. Secara prinsipnya, fungsi komite audit yaitu memberikan saran

kepada pihak manajemen berkenaan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016).

Dijelaskan lebih lanjut, dengan adanya kehadiran komite audit akan lebih mengontrol dan menghindari perilaku kecurangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan. Artinya, komite audit dapat memastikan kualitas informasi yang disampaikan pihak manajemen andal dan terpercaya.

2.1.6 Kualitas Audit

Asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajemen dapat diminimalisasi dengan mengimplementasikan prinsip GCG yaitu transparansi. Penerapan transparansi salah satunya dicerminkan melalui penggunaan jasa auditor (KAP) yang berkualitas. Penggunaan jasa auditor (KAP) yang berkualitas, lebih meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pengguna informasi keuangan lainnya atas keakuratan informasi yang disampaikan. Menurut Dewi dan Jati (2014), kualitas audit ialah segala kemungkinan yang bisa terjadi selagi auditor melaksanakan audit laporan keuangan suatu perusahaan, dan termasuk jika menemukan adanya pelanggaran atau kesalahan, kemudian melaporkannya dalam laporan audit.

Annisa & Kurniasih, (2012) mengungkapkan, bahwa laporan keuangan hasil pengauditan auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* (*Price Waterhouse Cooper* - PWC, *Deloitte Touche Tohmatsu*, EY - *Ernst & Young*, KPMG) dipercaya dapat menginformasikan nilai perusahaan yang sebenarnya dan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding perusahaan yang

diaudit oleh KAP *Non Big Four*. Kualitas audit pada suatu perusahaan dapat diukur melalui ukuran dari KAP yang digunakan.

2.1.7 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu dan melihat keberhasilan atas strategi marketing dan penjualan produk yang telah dijalankan perusahaan (Widarjo & Setiawan, 2009). Dalam penelitian Hidayat (2018), diterangkan juga bahwa melalui pertumbuhan penjualan perusahaan dapat mengukur keberhasilan atas investasi pada periode tahun sebelumnya dan bayangan akan besarnya penjualan perusahaan pada periode kini. Indikator keberhasilan operasi perusahaan dapat dilihat melalui besarnya *sales growth* ini.

Dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan penjualan merupakan tingkatan besarnya perkembangan penjualan dari tahun sebelumnya dibanding tahun sekarang dan dari itu, bisa memberikan gambaran pada pihak manajemen akan seberapa besar profit yang nantinya akan diperoleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan maka akan menghasilkan nilai laba yang besar pula, dan ini menggambarkan kinerja perusahaan yang juga semakin baik.

2.1.8 Corporate Social Responsibility (CSR)

Perusahaan *go public* diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan atas dampak dari aktivitas operasinya yang berkenaan dengan sosial dan lingkungan atau yang disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur mekanisme tanggung jawab

sosial dan lingkungan perseroan terbatas, telah mewajibkan perseroan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan kegiatan CSR dan menyampaikannya dalam laporan tahunan.

CSR menjadi sebuah indikator untuk melihat kepedulian dan seberapa besar kontribusi suatu perusahaan pada lingkungannya. Menurut Rahmawati et al. (2016), penerapan CSR dilakukan perusahaan sebagai bentuk usaha untuk memperoleh profit sebanyak-banyaknya dengan tetap melakukan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya, tidak terkecuali pihak-pihak yang terdampak atas aktivitas dari perusahaan.

Aktivitas *corporate social responsibility* ini menyertakan berbagai kalangan di perusahaan mulai dari internal sampai ke eksternal, termasuk di dalamnya yaitu investor atau pemilik modal, para *stakeholder*, pegawai atau karyawan, pemerintah, dan kalangan masyarakat. Adanya pengelolaan aktivitas tanggung jawab sosial yang baik oleh perusahaan akan menghasilkan reputasi yang semakin baik pula dan dapat memajukan bisnis perusahaan.

2.1.9 Tax Avoidance

Perusahaan tentunya akan mengusahakan pencapaian nominal laba akhir yang tinggi dan akan berusaha menekan apa saja yang dapat mengurangi besarnya laba, salah satunya juga dalam hal beban pajak terutang. Beragam usaha yang dapat dijalankan, baik yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan (legal) atau bahkan dengan langkah yang menyalahi hukum (ilegal). Segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memberikan efek pengurangan terhadap kewajiban pajak

perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) dari Undang-Undang disebut *tax avoidance* (Sandy & Lukviarman, 2015).

Tax avoidance merupakan wujud bagian perencanaan pajak yang dilaksanakan dengan masih berada dalam satu pusran aturan perpajakan. Pihak manajemen perusahaan akan acapkali melakukukan *tax avoidance* ini karena menafsirkannya sebagai suatu hal yang legal dan sah-sah saja untuk dilakukan. Ngadiman & Puspitasari (2014) menerangkan, secara hukum pemerintah tidak dapat menuntut atas aktivitas *tax avoidance* ini, meski dampaknya yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Namun pastinya hal penghindaran pajak ini sangat tidak diharapkan oleh pemerintah.

Dalam penelitian Fadhilah (2014), menerangkan bahwa komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menuturkan tiga karakter penghindaran pajak yaitu:

- a) Terdapat unsur artifisial, yang mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
- b) Memanfaatkan celah (*loopholes*) dari undang-undang atau menerapkan aturan-aturan legal untuk berbagai maksud dan tujuan, yang tidak sesuai dengan isi maksud dari undang-undang itu sendiri.
- c) Adanya unsur rahasia. Para konsultan yang mengurus pajak perusahaan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak harus sangat menjaga kerahasiaan ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Annisa & Kurniasih (2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Fadhilah (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)	Komite audit dan kualitas audit keduanya berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Di samping itu, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Dewi & Jati (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada <i>Tax Avoidance</i> di Bursa Efek Indonesia	Kualitas audit dan komite audit, berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Artinya, tingkat kualitas audit dan komite audit yang tinggi dapat meningkatkan kualitas GCG dan mengurangi praktik penghindaran pajak.
4.	Ngadiman & Puspitasari (2014)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012	Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Artinya, semakin tinggi kepemilikan institusional maka juga akan semakin mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.
5.	Sandy & Lukviarman (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur	Kualitas audit bersama komite audit keduanya menunjukkan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara kepemilikan institusional dianggap tidak sebagai penentu dalam praktik <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
6.	Damayanti & Susanto (2015)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Ratmono & Winarti (2015)	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak	Pengungkapan CSR terhadap ETR berpengaruh secara positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi pengungkapan CSR pada perusahaan maka tingkat agresivitas pajak akan semakin rendah.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Pradnyadari & Rohman (2015)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak	CSR berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR).
9.	Maraya & Yendrawati (2016)	Pengaruh <i>corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility disclosure</i> terhadap <i>tax avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO	Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan CSR disclosure berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Sunarsih & Oktavia (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI	Jumlah komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan pada manajemen, dan menjadikannya tidak melakukan <i>tax avoidance</i> . Penggunaan jasa audit (KAP) yang berkualitas terbukti dapat menekan perilaku penghindaran pajak pada perusahaan.
11.	Rahmawati et al., (2016)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014)	Pengungkapan CSR terbukti mempengaruhi entitas melakukan <i>tax avoidance</i> sebaliknya, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan dapat menghindari tindakan <i>tax avoidance</i> .
12.	Dewinta & Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Semakin tinggi penjualan akan menjumlah beban pajak yang besar pula sehingga perusahaan melakukan praktik <i>tax avoidance</i> .
13.	Diantari & Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Tingkat komite audit yang tinggi akan menekan tindakan <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan.
14.	Wiguna & Jati (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Preferensi Risiko Eksekutif, dan <i>Capital Intensity</i> pada Penghindaran Pajak	CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR pada perusahaan semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.
15.	Dharma & Noviari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Banyaknya pengungkapan CSR akan semakin menurunkan praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
16.	Oktamawati (2017)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Artinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka akan semakin rendah tingkat <i>tax avoidance</i> pada perusahaan. Sementara komite audit sendiri tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
17.	Mahanani et al., (2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Sales Growth</i> , dan CSR Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara CSR dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> yang akan dilakukan oleh perusahaan.
18.	Nugraheni & Pratomo (2018)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	Komite audit memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dengan arah negatif, sementara kualitas audit terbukti tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
19.	Makhfudloh et al., (2018)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak (ETR).
20.	Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi pada perusahaan akan semakin mengurangi tingkat <i>tax avoidance</i> karena atas penjualan yang tinggi dan akan laba yang besar membuat perusahaan mampu membayar pajak dan tidak melakukan <i>tax avoidance</i> .
21.	Pitaloka & Merkusyawati, (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Artinya, dengan adanya komite audit dapat menekan tindakan <i>tax avoidance</i> yang akan dilakukan pihak manajemen perusahaan.
22.	Januari & Suardhika (2019)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Semakin tinggi aktivitas CSR pada perusahaan akan mengurangi tingkat <i>tax avoidance</i> . Sebaliknya, pada variabel <i>sales growth</i> menunjukkan pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> (ETR) yang artinya <i>sales growth</i> yang tinggi maka <i>tax avoidance</i> akan ikut tinggi.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
23.	Dewi (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit secara bersama berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional sendiri berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> dan komite audit tidak berpengaruh.
24.	Honggo & Marlinah (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) sementara, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
25.	Rombbunga & Pesudo (2019)	Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak	Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
26.	Payanti & Jati (2020)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: hasil kajian penulis, 2021

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam teori agensi (*agency theory*) terdapat ketimpangan luasnya informasi yang dimiliki antara pihak *principal* maupun *agent*, yang disebut dengan asimetri informasi. Manajer (*agent*) sebagai pihak pengelola tentunya lebih jauh mengetahui informasi dan *going concern* dari perusahaan dibanding pihak *principal*. Kondisi asimetri informasi ini membuat manajer dapat lebih berkesempatan untuk mengedepankan keuntungan pribadinya (oportunis) dan terkadang bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Permasalahan asimetri informasi antara pihak *principal* sebagai pihak yang kurang mengetahui informasi dari perusahaan dan mengkhawatirkan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen. Salah satunya yaitu tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh pihak manajemen. Dimana manajer sebagai pengelola, demi memuaskan pihak *principal* dan kinerjanya dinilai baik maka manajer berusaha menunjukkan keberhasilannya dengan melaporkan informasi atas kinerja perusahaan yang baik yang dicerminkan dengan angka laba yang tinggi. Atas keberhasilannya ini, manajer tentu akan memenuhi kepentingan pribadinya yaitu mendapatkan *reward*.

Namun, usaha untuk memperoleh nilai laba yang tinggi yang dilakukan pihak manajer pastinya akan menghasilkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga akan meningkat. Inilah yang mendorong manajer untuk melakukan tindakan *tax avoidance* agar mengurangi peningkatan nilai beban pajak yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga *reward* yang diperoleh manajer tetap tinggi. Untuk mengatasinya, diperlukan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan adanya suatu sistem GGG dalam perusahaan maka dapat mengawasi dan memastikan pihak manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Mekanisme dari GCG seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen sehingga informasi yang dilaporkan kepada pihak pemegang saham dapat diinformasikan dengan penuh transparansi dan berkualitas. Sehubungan dengan ini maka tindakan

penghindaran pajak yang kemungkinan dilakukan oleh manajemen dapat dikontrol.

Kepemilikan saham pihak institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan pembayaran pajak perusahaan dan meminimalkan perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak. Kemudian kehadiran komite audit dalam perusahaan mampu mengendalikan kebijakan internal keuangan dan akuntansi perusahaan sehingga keputusan pihak manajer dalam hal penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Adanya kualitas audit juga dapat meningkatkan informasi yang dilaporkan lebih transparan dan akurat. Tingkat kepercayaan pemegang saham akan lebih meningkat atas informasi yang disajikan dengan penggunaan jasa audit yang berkualitas. Begitu pula dalam hal perpajakan, laporan keuangan yang diaudit oleh jasa KAP yang lebih berkualitas dipercaya dapat menyajikan nilai perusahaan yang sebenarnya dan terhindar dari kecurangan dan praktik penghindaran pajak. KAP yang berkualitas dan profesional tentunya dapat mendeteksi apabila ada kecurangan maupun tindak manipulatif dalam pelaporan keuangan perusahaan termasuk dalam hal pajak.

Di samping itu, informasi yang diketahui pihak manajer mengenai pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memberikan gambaran pada pihak manajemen akan seberapa besarnya penjualan yang akan dihasilkan perusahaan. Peningkatan akan besarnya penjualan dari perusahaan tentunya juga akan mengarah pada laba perusahaan yang meningkat. Hal ini tentunya akan berbanding lurus dengan besarnya nilai beban pajak yang juga akan meningkat.

Dalam menyikapi ini, adanya kemungkinan manajer untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*, agar *reward* yang didapatkan atas kinerjanya tidak berkurang.

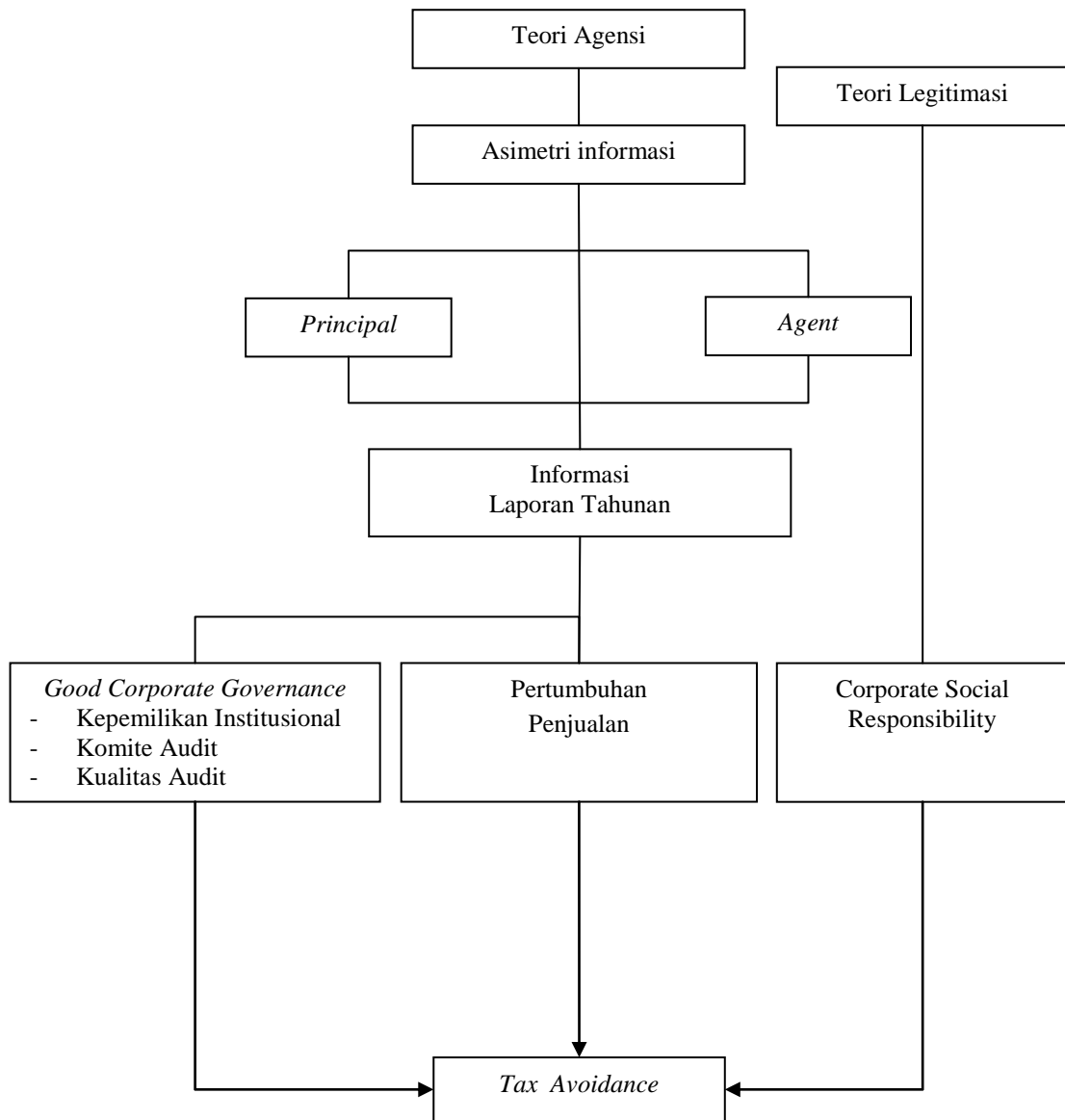
Pada penelitian ini juga menggunakan teori legitimasi untuk menggambarkan hubungan antara variabel CSR dengan *tax avoidance*. Dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa, demi keberlangsungan hidupnya perusahaan membutuhkan legitimasi dari lingkungan dan masyarakat. Pajak dan CSR keduanya memiliki kemiripan yaitu sama-sama berkontribusi dan merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan usahanya sesuai norma sosial yang berlaku salah satu caranya yaitu dengan melalui pemerintah berupa memenuhi pembayaran pajaknya sesuai dengan kewajibannya.

Berbagai aktivitas tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap kemungkinan tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan. Menurut Payanti & Jati (2020), terdapat berbagai biaya yang berkaitan dengan aktivitas CSR perusahaan yang dapat sebagai pengurang penghasilan sebelum pajak (*deductible expense*) antara lain seperti biaya pengelolaan limbah, sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional, beasiswa dan biaya pelatihan, sumbangan fasilitas pendidikan, biaya magang, dan lain sebagainya.

Berbagai biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait program CSR yang dilakukan perusahaan akan mengurangi laba perusahaan yang mana akan berujung kecilnya besaran beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Hal ini akan

mendorong meminimalisir tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan. Dengan semakin banyak pengungkapan aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan maka akan semakin menambah citra baik bagi perusahaan. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan hanya akan merusak legitimasi dan citra baik yang telah didapatkan oleh perusahaan melalui banyaknya aktivitas CSR yang telah dilakukan.

Gambar kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah, 2021

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, adanya asimetri informasi di antara pihak *principal* dan *agent* memunculkan kekhawatiran dari pemilik atas kemungkinan manajer tidak menginformasikan dengan jelas atas langkah yang diambilnya dan

bertindak oportunist demi kepentingan pribadinya semata. Untuk meminimalisasi tingkat asimetri informasi tersebut dan untuk mengantisipasi diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang tepat, salah satunya yaitu melalui kepemilikan institusional.

Kepemilikan saham oleh pihak institusi dapat menekan motivasi dari manajer untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan adanya tingkat kepemilikan institusional dapat menyebabkan manajer merasa terawasi kinerjanya dan tidak cenderung melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Maraya & Yendrawati (2016) dan Rahmawati et al. (2016) juga mendapati hasil demikian yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dengan semakin besarnya tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusi maka semakin besar pula hak suara yang dimiliki terhadap perusahaan akan menjadikannya dapat mendorong pihak manajemen untuk tidak cenderung bertindak oportunist dan patuh terhadap pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Payanti & Jati (2020) mengatakan, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan dapat menekan dan mengawasi tindakan manajemen terkait keputusan perpajakan khususnya dalam hal *tax avoidance*.

Dengan demikian, investor institusional memiliki insentif untuk mengawasi langkah yang akan diambil oleh manajer dan mengawasi perilaku manajer dalam

penghindaran pajak maka kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan secara negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, adanya perbedaan level informasi yang dimiliki antara pemilik dan pengelola perusahaan membuat diperlukannya suatu mekanisme yang dapat memonitoring kualitas informasi antara kedua belah pihak. Keberadaan komite audit dipercaya dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dan meningkatkan kualitas GCG dalam perusahaan. Komite audit berdasarkan fungsinya dapat memastikan penyusunan informasi laporan keuangan perusahaan yang akan disampaikan ke pemegang saham dan pengguna informasi keuangan telah sesuai dengan aturan dan tidak ada praktik akuntansi yang menyimpang.

Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya dapat melakukan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dan mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan kecenderungan melakukan *tax avoidance* dapat diminimalisir. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) yang menemukan hasil komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Dewi & Jati (2014) menyatakan perusahaan dengan tingkat komite audit yang tinggi di dalamnya akan lebih terbuka dalam pelaporan keuangannya dan praktik penghindaran pajak dapat terhindarkan. Hal demikian juga selaras dengan hasil penelitian Sandy &

Lukviarman (2015), Sunarsih & Oktavia (2016), dan Diantari & Ulupui (2016) yang menemukan hasil komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sesuai dengan aturan BAPEPAM yang mengharuskan paling setidaknya komite audit dalam perusahaan berjumlah 3 orang. Jika tidak memenuhi jumlah tersebut maka dapat memunculkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dibuktikan dengan hasil penelitian Pitaloka & Merkusyawati (2019) yang menyimpulkan *tax avoidance* dapat diminimalkan dengan semakin besarnya jumlah komite audit pada perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Komite Audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, adanya asimetri informasi memunculkan kekhawatiran dari pihak pemilik saham atas informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat meningkatkan transparansi atas informasi tersebut. Transparansi dapat dicapai melalui pelaporan perusahaan pada pasar modal dan rapat pemegang saham terkait perpajakan perusahaan, peningkatan transparansi terkait pajak ini selalu menjadi sorotan oleh publik karena beranggapan acapkali adanya perilaku perusahaan yang agresif terhadap pajak (Rahmawati et al., 2016). Dalam hal ini transparansi dapat diukur melalui kualitas audit.

Penggunaan jasa auditor yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap informasi keuangan yang dilaporkan. Dalam hal ini tentunya

praktik penghindaran pajak juga dapat dicegah. Semakin tinggi kualitas audit maka akan semakin menekan kecenderungan manajer melakukan kecurangan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Annisa & Kurniasih (2012) dan Dewi & Jati (2014) terbukti bahwa adanya pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015) juga menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Oktavia (2016) juga mendapati hasil yang serupa, yang menyimpulkan bahwa penggunaan jasa audit yang berkualitas termasuk KAP *The Big Four* memungkinkan manajemen tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian semakin tinggi kredibilitas dari suatu KAP maka akan meningkatkan juga transparansi dan kepatuhan perusahaan dalam perpajakan dan tindakan *tax avoidance* juga akan semakin rendah. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Kualitas Audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, luasnya informasi yang dimiliki oleh manajer menjadikannya lebih mengetahui arah dan laju pertumbuhan dari perusahaan. Manajer dapat memperkirakan seberapa besar profit yang akan didapatkan perusahaan di masa mendatang lewat besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat memungkinkan mendorong

manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan kata lain, nilai pertumbuhan penjualan yang meningkat tentunya akan menghasilkan peningkatan pada besarnya keuntungan yang akan di dapat perusahaan dan tentu terdapat peningkatan besarnya pajak yang harus dibayarkan atas peningkatan keuntungan tersebut.

Manajer demi mencapai keuntungannya akan terdorong untuk melakukan *tax avoidance* agar beban pajak yang ditanggung perusahaan tetap rendah. Sehubungan dengan pernyataan tersebut penelitian Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, penelitian Januari & Suardhika (2019) dan Payanti & Jati (2020) juga konsisten mendapati hasil yang serupa yaitu peningkatan besarnya pertumbuhan penjualan akan meningkatkan praktik *tax avoidance* pula pada perusahaan untuk menghemat beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.5 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada teori legitimasi, perusahaan membutuhkan pengakuan atau legitimasi dan citra positif dari lingkungannya demi keberlangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk mendapatkan citra positif yaitu melalui aktivitas CSR. Dengan adanya pengungkapan informasi CSR oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai bentuk komunikasi perusahaan terhadap masyarakat bahwa

perusahaan telah memenuhi harapan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan yang menyadari pentingnya aktivitas CSR juga akan lebih peduli dan sadar akan kewajiban perpajakannya.

Semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat dan mendapatkan utilitas yang signifikan berupa baiknya reputasi perusahaan. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial akan melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang sadar sosial yang menyadari pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial secara maksimal berkelanjutan lebih cenderung mengurangi usahanya dalam praktik penghindaran pajak yang dapat merusak citranya (Januari & Suardhika, 2019).

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012), Ratmono & Winarti (2015), Dharma & Noviani (2017) terbukti bahwa CSR memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Januari & Suardhika (2019) juga mendapati kesimpulan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR pada perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil tersebut sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan akan berusaha mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menghindari tindakan – tindakan yang dapat merusak reputasinya.

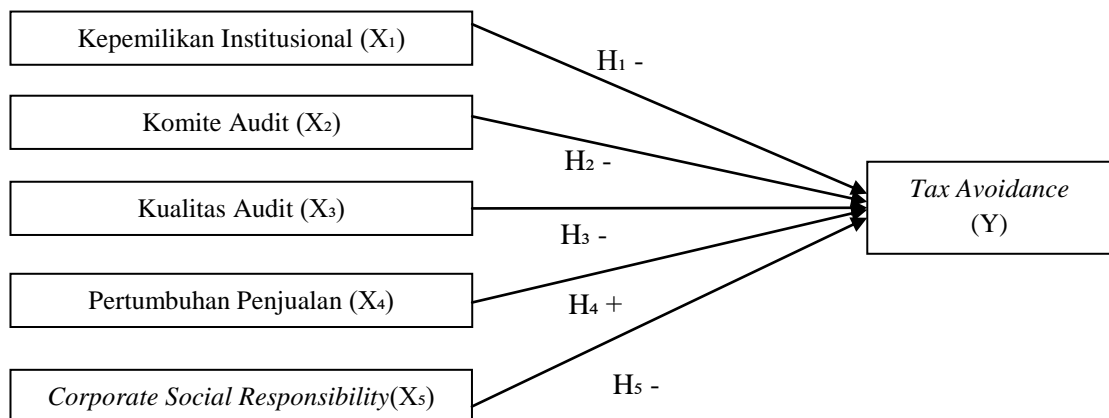
Perusahaan yang telah banyak melakukan aktivitas CSR dan mengungkapkannya pada laporan tahunan untuk memperoleh legitimasi masyarakat dan citra positif, memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi

termasuk tanggung jawab nya dalam membayar pajak sesuai kewajibannya, yang mana ditunjukkan dengan sikap patuh terhadap pembayaran pajak dengan tingkat praktik *tax avoidance* yang rendah. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₅: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.5 Model Penelitian

Model penelitian untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

3.1.1 Definisi *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan suatu usaha untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan cara yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini pengukuran *tax avoidance* yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Tarif pajak efektif (ETR) dapat mengukur seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak relatifnya terhadap pendapatan sebelum pajak perusahaan. Adapun perhitungan ETR dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Lanis & Richardson, 2012) :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

3.1.2 Definisi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan besarnya tingkat kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi termasuk di dalamnya perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, pemerintah, lembaga dan perusahaan lainnya. Persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional pada suatu perusahaan yang akan dijadikan indikator pengukuran. Menurut Rahmawati et al. (2016), pengukuran kepemilikan institusional dapat dihitung dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar lalu dikalikan 100%. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.1.3 Definisi Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk perusahaan, dimana di dalamnya terdiri dari sejumlah orang yang berperan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam internal perusahaan, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit, dan sebagai perantara komunikasi perusahaan dengan auditor eksternal perusahaan. Menurut peraturan BAPEPAM, komite audit sekurang-kurangnya dalam perusahaan berjumlah tiga orang, terdiri dari satu orang komisaris independen yang mana juga selaku ketua komite audit dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Pengukuran variabel komite audit dalam penelitian ini dengan menjumlahkan banyaknya satuan orang dalam komite audit di perusahaan berdasarkan pada penelitian Sunarsih & Oktavia (2016).

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

3.1.4 Definisi Kualitas Audit

Kualitas audit yaitu pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh jasa auditor eksternal. Kualitas audit diukur berdasarkan besar atau kecilnya ukuran suatu jasa auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan perusahaan. KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkredibilitas, profesional, dan independen sehingga dapat memberikan hasil audit pada laporan keuangan perusahaan yang lebih terjamin.

Pada penelitian ini, pengukuran kualitas audit berdasarkan dari penelitian Sandy & Lukviarman (2015) yaitu apabila perusahaan yang diaudit oleh KAP

yang termasuk dalam *The Big Four* di antaranya adalah *Price Waterhouse Cooper* (PWC), *Deloitte Touche Tohmatsu*, KPMG, *Ernst & Young* (E&Y) maka akan diberi nilai 1, dan apabila perusahaan diaudit oleh di luar dari yang termasuk kategori KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0.

3.1.5 Definisi Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah tingkat perubahan nilai penjualan perusahaan antara tahun lalu dengan tahun sekarang. Nilai pertumbuhan penjualan ini nantinya yang akan dijadikan acuan untuk memprediksi seberapa besar profit perusahaan di masa mendatang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur melalui perhitungan penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya lalu dibagi dengan nilai penjualan tahun sebelumnya. Adapun rumus pengukuran pertumbuhan penjualan berdasarkan penelitian Januari & Suardhika (2019) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{P_t - (P_{t-1})}{P_{t-1}}$$

3.1.6 Definisi *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sejumlah aktivitas serta berbagai program tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan sebagai bentuk kepedulian dan menanggungjawab akibat dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial ini bersifat wajib untuk emiten yang aktivitas operasinya berhubungan langsung dengan sumber daya alam dan berdampak terhadap masyarakat. Pengukuran variabel *corporate social responsibility* pada penelitian ini akan diukur menggunakan rasio pengungkapan tanggung jawab sosial atau *CSR disclosure*.

Pengungkapan CSR dinilai berlandaskan pada standar yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam hal ini yaitu indeks GRI G4 dan *GRI Standards* (GRI 2016), yang mana terdapat 91 item indikator pengungkapan untuk GRI G4 dan terdapat 77 item topik spesifik yang diungkapkan dalam *GRI Standards*. Jika terdapat item atau indikator dalam indeks GRI G4 maupun *GRI Standards* yang telah diungkapkan perusahaan, baik dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan (*sustainability reporting*) maka akan diberi nilai 1 (satu), dan sebaliknya jika tidak terdapat informasi yang diungkapkan pada indikator tersebut di beri nilai 0 (nol). Perhitungan nilai pengungkapan CSR selanjutnya menggunakan proksi CSRI dengan rumus sebagai berikut: (Maraya & Yendrawati, 2016)

$$CSRI = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

CSRI : Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan i

$\sum X_{yi}$: nilai = 1 jika item yi diungkapkan; nilai = 0 jika item yi tidak diungkapkan

n_i : jumlah item pengungkapan untuk perusahaan i

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2020. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan cara *purposive sampling*. Adapun penentuan sampel dengan teknik *purposive sampling* dalam

penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2020.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dengan data lengkap terkait dengan variabel penelitian ini secara konsisten berturut-turut selama 7 periode yaitu tahun 2014-2020.
- c. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau menampilkan laba positif selama dalam kurun periode yang diteliti.

Tabel 3. 1 Teknik Pengumpulan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2020	52
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dengan data lengkap terkait dengan variabel penelitian ini secara konsisten berturut-turut selama 7 periode yaitu tahun 2014-2020	(19)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian atau menampilkan laba negatif selama dalam kurun periode yang diteliti	(24)
Total perusahaan yang menjadi objek penelitian		9

Sumber: www.idx.co.id (data diolah, 2021)

Berdasarkan kriteria penentuan sampel yang digunakan, terdapat 9 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020 yang memenuhi kriteria dengan periode amatan selama 7 tahun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Dimana data kuantitatif tersebut disajikan dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung dan memiliki satuan pengukuran yang jelas, yang terdapat pada laporan keuangan

dan *annual report* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2020.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data yang bersifat sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari lapangan tetapi melalui media perantara atau berbentuk data yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang akan diteliti yaitu berupa data dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan periode tahun 2014-2020 yang terdaftar di BEI yang dipublikasikan melalui www.idx.co.id maupun website resmi perusahaan yang bersangkutan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dimana pengumpulan data melalui data sekunder berupa dokumen-dokumen yang telah ada. Dalam hal ini yaitu berupa *annual report* dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode yang diteliti.

3.5 Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data berdasarkan hipotesis yang telah diterangkan sebelumnya menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014), statistik deskriptif dapat menggambarkan karakteristik umum dari suatu data sampel yang digunakan

dalam penelitian dengan lebih rinci. Untuk itu, sebelum melakukan pengujian statistik yang lebih lanjut, diperlukan analisis deskriptif yang menjelaskan tentang deskripsi data masing-masing variabel yang terkait dengan penelitian ini sehingga dapat diketahui karakteristik data seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah bertujuan untuk menguji seluruh data sebelum digunakan agar diperoleh hasil pengujian yang baik, tidak melanggar asumsi klasik yang ada, hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Oleh karena itu, sebelum pengujian regresi linier berganda dilakukan perlu terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

3.5.2.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Sandy & Lukviarman (2015), uji multikolinearitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas, yang mana seharusnya model regresi yang baik tidak terjadi adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat dari *tolerance value* atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut: (Fadhilah, 2014)

- a. Apabila *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 maka dinyatakan bebas dan tidak terjadi multikolinearitas.

- b. Apabila *tolerance value* $< 0,1$ atau nilai *VIF* > 10 maka terjadi multikolinearitas.

3.5.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel yang diteliti terdistribusi secara normal atau tidak (Sandy & Lukviarman, 2015). Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ artinya data dikatakan berdistribusi normal
- b. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ artinya data berdistribusi tidak normal

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Dharma & Noviani (2017), diperlukan pengujian autokorelasi yang tujuannya untuk melihat apakah dalam model regresi linear dalam penelitian terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari masalah autokorelasi. Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat dari nilai *Durbin-Watson*. Jika nilai DW lebih besar dari nilai DU maka model dikatakan bebas dari autokorelasi (Dharma & Noviani, 2017).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wiguna & Jati (2017), uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Dimana, model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser, dengan kriteria apabila tingkat sig > 0,05 maka dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Fadhilah, 2014).

3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Gani & Amalia (2015), pengujian dengan menggunakan model regresi linear berganda dapat menjelaskan hubungan fungsional antara beberapa variabel, yang mana terdiri dari satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini, untuk analisis regresi linear berganda yang digunakan terdiri dari satu variabel dependen dan lima variabel independen, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1KI + \beta_2KOA + \beta_3KUA + \beta_4SG + \beta_5CSR + e$$

Keterangan:

Y : *Effective Tax Rate* (ETR)

KI : Kepemilikan Institusional

KOA : Komite Audit

KUA : Kualitas Audit

SG : Pertumbuhan Penjualan

CSR : *Corporate Social Responsibility*

α : Konstanta

$\beta_1... \beta_5$: Koefisien

e : *Error Term*

3.5.4 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model regresi adalah bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang diteliti layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Payanti & Jati, 2020).

3.5.4.1 Uji Koefisien Korelasi (R)

Menurut Ghozali (2013), analisis korelasi dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan (asosiasi) linear antar dua variabel. Dimana dalam analisis korelasi tidak membedakan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel independen dengan variabel dependen diukur dengan pembagian kelompok sebagai berikut: (Gani & Amalia, 2018)

- a. $R = < 0,25$ diartikan hubungannya sangat lemah
- b. $R = 0,25 - 0,49$ diartikan hubungannya lemah
- c. $R = 0,50 - 0,75$ diartikan hubungannya kuat
- d. $R = 0,75$ diartikan hubungannya sangat kuat

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan dari regresi linear berganda yaitu persentase sumbangan (*goodness of fit*) dari variabel independen terhadap variabel dependen (Fadhilah, 2014).

Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dimana, nilai R^2 adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil diartikan bahwa sangat terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen sedangkan nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.5.4.3 Uji F

Menurut Ghozali (2013), uji kelayakan model atau yang disebut juga *goodness of fit test* bertujuan untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Uji kelayakan model (*goodness of fit test*) dilakukan dengan melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yang mana diukur dan ditunjukkan melalui nilai statistik F. Kriteria penentu uji F adalah sebagai berikut: (Gani & Amalia, 2018)

- a. Apabila nilai sig F $< 0,05$ artinya dikatakan bahwa model regresi layak untuk digunakan pada penelitian
- b. Apabila nilai sig F $> 0,05$ artinya dikatakan bahwa model regresi tidak layak untuk digunakan pada penelitian

3.5.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan pada model regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh nyata atau signifikansi dari variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) (Gani & Amalia, 2018). Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria penentuan uji hipotesis ini yaitu apabila nilai $p < 0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y sedangkan apabila nilai p

$> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y (Sujarweni, 2018).

Gani & Amalia (2018) menerangkan, bahwa arah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan nilai koefisien regresi (β). Jika β bernilai positif, artinya terjadi hubungan yang searah, dimana ketika variabel independen meningkat maka akan mengalami peningkatan pula pada variabel dependen, begitupun ketika terjadi penurunan. Jika β bernilai negatif, artinya terjadi hubungan yang berlawanan atau tidak searah, dimana ketika variabel independen meningkat maka pada variabel dependen akan mengalami penurunan, dan begitupun ketika terjadi penurunan pada variabel independen maka pada variabel dependen akan turut mengalami kenaikan.

Untuk itu, kriteria pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Hipotesis dinyatakan diterima apabila *p value* $< 0,05$ dan nilai β menunjukkan arah positif, yang artinya kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

H₂ : Hipotesis dinyatakan diterima apabila *p value* $< 0,05$ dan nilai β menunjukkan arah positif, yang artinya komite audit dinyatakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

H₃ : Hipotesis dinyatakan diterima apabila *p value* $< 0,05$ dan nilai β menunjukkan arah positif, yang artinya kualitas audit dinyatakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

H₄ : Hipotesis dinyatakan diterima apabila *p value* < 0,05 dan nilai β menunjukkan arah negatif, yang artinya pertumbuhan penjualan dinyatakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*.

H₅ : Hipotesis dinyatakan diterima apabila *p value* < 0,05 dan nilai β menunjukkan arah positif, yang artinya *corporate social responsibility* dinyatakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama kurun periode 2014-2020 dengan menggunakan data berasal dari laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan oleh perusahaan dan memiliki data lengkap terkait variabel-variabel yang berkenaan dengan penelitian ini. Dari jumlah populasi sebanyak 52 perusahaan pertambangan dan setelah dilakukan teknik *purposive sampling* dengan berbagai kriteria sehingga dihasilkan terdapat 9 sampel yang memiliki data lengkap dan konsisten tersedia informasinya selama tahun amatan yang dapat digunakan pada penelitian ini.

Dalam hal ini, dengan 9 sampel perusahaan dan tahun amatan selama 7 tahun (2014-2020) didapatkan terdapat sebanyak 63 data perusahaan yang akan dilakukan analisis dan diuji secara terpisah tiap-tiap pengaruh dari variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit, Pertumbuhan Penjualan, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk dapat merefleksikan dan menerangkan data pada masing – masing variabel yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Secara detail, karakteristik data yang mana dalam hal ini yang

diperlukan berupa nilai maksimum, nilai minimum, besarnya nilai rata-rata (*mean*), hingga standar deviasi dapat diterangkan melalui analisis deskriptif ini.

Hasil uji analisis deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Uji Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	63	0,0533	0,9779	0,67215	0,2991002
Komite Audit	63	2	4	3,10	0,346
Pertumbuhan Penjualan	63	-0,9182	0,9308	0,06644	0,2922077
<i>Corporate Social Responsibility</i>	63	0,0649	0,8352	0,37069	0,1902664
ETR	63	0,1492	0,5474	0,30626	0,0860948
Variabel	Dummy = 1		Dummy = 0		
	Obs.	%	Obs.	%	
Kualitas Audit	49	77,8	14	22,2	

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.1, hasil uji analisis deskriptif terhadap variabel Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit, Pertumbuhan Penjualan, *Corporate Social Responsibility*, dan *Tax Avoidance* yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 23 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 63 data yang diobservasi dan dilakukan pengujian (N) untuk tiap-tiap variabel.

Pada kepemilikan institusional sebagai variabel independen (X1) memiliki nilai terendah atau minimum sebesar 0,0533 dan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 0,9779 serta didapatkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,67215. Merujuk pada hasil tersebut, dapat diartikan bahwa apabila nilai kepemilikan institusional lebih besar dari 0,67215 maka semakin tinggi tingkat kepemilikan saham institusional pada perusahaan tersebut. Sebaliknya, apabila nilai kepemilikan institusional kurang dari 0,67215 maka tingkat kepemilikan saham institusional pada perusahaan tersebut rendah.

Komite audit sebagai variabel independen (X2) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) di angka 3,10 yang artinya apabila jumlah komite audit pada perusahaan di atas nilai rata-rata 3,10 maka tingkat komite audit perusahaan tersebut tinggi. Namun, apabila jumlah komite audit di bawah dari 3,10 maka perusahaan tersebut memiliki tingkat komite audit yang rendah. Komite Audit sendiri memiliki nilai terendah atau minimum sebesar 2 dan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 4.

Kualitas audit sebagai variabel independen (X3) yang menggunakan pengukuran *dummy* dimana diberi nilai 1 jika perusahaan menggunakan KAP yang termasuk *the big four* dan diberi nilai 0 jika tidak termasuk KAP *the big four*. Hasil pada tabel 4.1 menunjukkan sebanyak 77,8 % atau 49 data amatan perusahaan telah menggunakan KAP yang termasuk *the big four* yang mana dianggap lebih berkualitas dalam mengaudit laporan perusahaan dan sisanya 22,2% atau 14 data yang menggunakan KAP *non big four*.

Pertumbuhan penjualan (X4) pada hasil analisis deskriptif di atas, memiliki nilai minimum sebesar - 0,9182 dan nilai maksimum sebesar 0,9308 sedangkan untuk nilai rata-rata sendiri sebesar 0,06644. Artinya, apabila perusahaan memiliki nilai pertumbuhan penjualan di atas nilai rata-rata 0,06644 maka tingkat pertumbuhan penjualannya dapat dikatakan tinggi. Namun, sebaliknya jika angka pertumbuhan penjualan di bawah nilai rata-rata 0,06644 maka tingkat pertumbuhan penjualan pada perusahaan tersebut tergolong rendah.

Variabel independen terakhir yaitu *Corporate Social Responsibility* (X5) memiliki nilai *mean* atau rata-rata sebesar 0,37069 yang dimana apabila nilai CSR perusahaan lebih besar dari nilai mean 0,37069 maka tingkat CSR yang dilakukan

perusahaan tinggi dan sebaliknya apabila nilai CSR pada perusahaan menunjukkan lebih rendah dari 0,37069 maka tingkat CSR yang dilakukan perusahaan tersebut rendah. Nilai minimum dan maksimum sendiri pada variabel CSR yaitu 0,0649 dan 0,8352.

Tax Avoidance sebagai variabel dependen (Y) yang diproksikan dengan ETR, hasil pada tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata ETR sebesar 0,30626. Apabila perusahaan memiliki nilai ETR yang nilainya di atas rata-rata 0,30626 maka diartikan tingkat *tax avoidance* rendah. Namun, apabila nilai ETR perusahaan di bawah rata-rata 0,30626 maka tingkat *tax avoidance* pada perusahaan tersebut tinggi. ETR sendiri memiliki nilai minimum sebesar 0,1492 dan nilai maksimum sebesar 0,5474.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya gejala korelasi yang kuat antar variabel bebas, yang mana seharusnya model regresi yang baik tidak terjadi adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas. Untuk mengetahuinya, pada penelitian ini dengan cara memperhatikan *tolerance value* atau nilai VIF. Jika *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas sedangkan jika *tolerance value* $< 0,1$ atau nilai VIF > 10 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kepemilikan Institusional	0,989	1,011
Komite Audit	0,841	1,188
Kualitas Audit	0,931	1,074
Pertumbuhan Penjualan	0,939	1,065
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0,856	1,169

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat di lihat bahwa dari tiap-tiap variabel bebas di atas baik kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *corporate social responsibility* memiliki nilai *tolerance* di atas 0,1 (*tolerance* > 0,1) dan nilai VIF dari masing-masing variabel bebas juga menunjukkan angka di bawah 10 (VIF < 10). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas sehingga model regresi tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas.

4.2.2.2 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel yang diteliti terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan memperhatikan nilai signifikansinya jika lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan *Kolmogrov-Smirnov* yang dilakukan pada sampel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		63
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,06388924
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,078
	<i>Positive</i>	0,078
	<i>Negative</i>	-0,049
<i>Test Statistic</i>		0,078
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>		0,200 ^{cd}

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.3, hasil SPSS *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test* diperoleh nilai signifikansi (*asymp. sig. (2-tailed)*) sebesar 0,200 kemudian jika dibandingkan dengan taraf signifikansi (α) 0,05 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 yang artinya data telah berdistribusi normal.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Pada penelitian ini, dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (DW). Jika nilai DW lebih besar dari nilai d_U maka model dikatakan bebas dari autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi untuk penelitian ini sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi

Model	<i>Durbin Watson</i>	N = 63	
		dL	dU
1	1,916	1,4265	1,7671

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa hasil nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,916. Dimana, pada penelitian ini yang menggunakan 63 data sampel dan memiliki lima variabel bebas sehingga didapatkan angka dL sebesar

1,4265 dan dU sebesar 1,7671. Dapat disimpulkan, bahwa nilai DW yaitu 1,916 berada di luar dari batas nilai dL dan dU. Dengan demikian, maka pada penilitan ini terbebas dari autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Glejser, dengan melihat nilai signifikansi (Sig.). Apabila tingkat sig > 0,05 maka dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Uji Glejser:

Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients Beta</i>	T	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>			
(Constant)	0,137	0,045		3,025	0,004
Kepemilikan Institusional	0,000	0,016	- 0,002	-0,019	0,985
Komite Audit	-0,039	0,015	-0,333	-2,517	0,150
Kualitas Audit	0,016	0,012	0,173	1,370	0,176
Pertumbuhan Penjualan	-0,020	0,017	-0,147	-1,169	0,247
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0,055	0,028	0,260	1,976	0,530

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.5, hasil uji glejser menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan institusional yaitu 0,985, variabel komite audit signifikansi sebesar 0,150, kualitas audit dengan signifikansi sebesar

0,176, pertumbuhan penjualan dengan nilai signifikansi 0,247, dan CSR signifikansinya sebesar 0,530. Dari keseluruhan variabel nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, kepemilikan institusioanal, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *corporate social responsibility* (CSR) yang mana sebagai variabel dependen dan *tax avoidance* sendiri sebagai variabel independen. Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda yang diolah dengan SPSS *versi 23*:

Tabel 4. 6 Uji Regresi Linear Berganda

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients Beta</i>	T	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>			
(Constant)	0,566	0,079		7,174	0,000
Kepemilikan Institusional	0,083	0,028	0,288	2,910	0,005
Komite Audit	-0,113	0,027	-0,453	-4,225	0,000
Kualitas Audit	-0,025	0,021	-0,122	-1,194	0,238
Pertumbuhan Penjualan	-0,077	0,030	-0,260	-2,564	0,013
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0,155	0,048	0,343	3,228	0,002

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas, dengan melakukan pengujian regresi yang mencakup 63 data sampel dapat dibuat persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,566 + 0,083KI - 0,113KOA - 0,025KUA - 0,077SG + 0,155CSR + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : ETR

KI : Kepemilikan Institusional

KOA : Komite Audit

KUA : Kualitas Audit

SG : Pertumbuhan Penjualan

CSR : *Corporate Social Responsibility*

ε : *Error*

Pembahasan dari persamaan regresi linear berganda di atas yaitu dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,566 yang artinya jika seluruh variabel independen KI, KOA, KUA, SG dan CSR bernilai nol maka nilai ETR adalah sebesar 0,537.

Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional sebesar 0,083 yang berarti apabila kenaikan kepemilikan institusional (KI) sebesar 1 maka akan diikuti dengan meningkatnya nilai ETR sebesar 0,083 dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

Nilai koefisien variabel komite audit (KI) sebesar -0,113. Dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan nilai komite audit sebesar 1 maka akan diikuti dengan menurunnya nilai ETR sebesar 0,113 yang mana dengan asumsi variabel independen lain konstan.

Nilai koefisien variabel kualitas audit sebesar -0,025. Hal ini menunjukkan jika kualitas audit meningkat sebesar 1 maka nilai ETR akan menurun sebesar 0,025 dengan asumsi variabel independen lain konstan.

Nilai koefisien variabel pertumbuhan penjualan (SG) menunjukkan nilai sebesar -0,077. Artinya, jika pertumbuhan penjualan naik sebesar 1 maka akan diikuti dengan menurunnya nilai ETR sebesar 0,077 dengan asumsi variabel independen lain konstan.

Nilai koefisien terakhir yaitu sebesar 0,155 milik variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai CSR terjadi kenaikan sebesar 1 maka akan diikuti dengan nilai ETR yang meningkat sebesar 0,155 dengan asumsi variabel independen lain konstan.

4.2.4 Uji Kelayakan Model

4.2.4.1 Uji Koefisien Korelasi (R)

Pengujian koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel independen dengan variabel dependen, dengan melihat pada nilai R yang diperoleh dari hasil analisis statistik. Berikut dasar pengukuran untuk menentukan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel yang menurut Gani & Amalia (2018) dibagi atas empat kelompok. Pertama, nilai $R < 0,25$ hubungannya sangat lemah. Kedua, nilai $R = 0,25 - 0,49$ hubungannya lemah. Ketiga, nilai $R = 0,50 - 0,75$ diartikan hubungannya kuat. Terakhir, nilai $R < 0,75$ diartikan hubungannya sangat kuat. Hasil dari pengujian koefisien korelasi nya sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7 Uji Koefisien Korelasi (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,670 ^a	0,449	0,401

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas, hasil uji koefisien korelasi (R) dapat diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,670 yang artinya termasuk

golongan hubungan yang kuat. Dapat disimpulkan, bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan CSR dengan *tax avoidance* (ETR) memiliki keterkaitan hubungan yang kuat.

4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan agar dapat menunjukkan tingkat ketepatan dari regresi linear berganda yaitu besarnya persentase yang diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini persentasenya ditentukan berdasarkan dari nilai *R square*. Hasil dari uji koefisien determinasi yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,670 ^a	0,449	0,401

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.8, hasilnya menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,449. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa ke lima variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan CSR memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR) sebesar 44,9% sementara sisanya 55,1% merupakan pengaruh dari variabel lainnya yang di luar dari penelitian ini.

4.2.4.3 Uji F

Uji F merupakan pengujian kelayakan model yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan model penelitian yang digunakan telah layak atau tidak. Dengan melihat apakah semua variabel independen pada penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan memperhatikan nilai sig F, apabila nilai sig F lebih kecil dari

tingkat *alpha* 0,05 maka model regresi layak digunakan, sebaliknya apabila nilai sig F lebih besar dari tingkat alpha 0,05 maka model regresi tidak layak digunakan pada penelitian. Berikut hasil uji statistik yang dilakukan:

Tabel 4. 9 Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
<i>1 Regression</i>	0,206	5	0,041	9,302	0,000 ^b
<i>Residual</i>	0,253	57	0,004		
Total	0,460	62			

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.9, menunjukkan besarnya nilai signifikansi untuk pengujian pada penelitian ini sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari tingkat *alpha* 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak untuk digunakan dan variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen.

4.2.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan bertujuan untuk melihat secara nyata pengaruh variabel kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap *tax avoidance* (ETR) atas dugaan yang telah dirumuskan oleh penulis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai β dan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat *alpha* sebesar 0,05. Berikut ini merupakan hasil uji hipotesis yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 10 Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	0,566	0,079	0,000
Kepemilikan Institusional	0,083	0,028	0,005
Komite Audit	-0,113	0,027	0,000
Kualitas Audit	-0,025	0,021	0,238
Pertumbuhan Penjualan	-0,077	0,030	0,013
Corporate Social Responsibility	0,155	0,048	0,002

Sumber : Data diolah, 2022

4.2.5.1 Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan pada tabel 4.10, diperoleh hasil untuk variabel kepemilikan institusional yaitu menunjukkan nilai beta sebesar 0,083 yang artinya memiliki arah positif terhadap ETR dengan nilai signifikansinya sebesar 0,005 yang dimana nilai signifikansi tersebut kurang dari tingkat *alpha* 0,05. Hal ini artinya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan dan arah pengaruhnya negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima.

4.2.5.2 Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan pada tabel 4.10, diperoleh hasil untuk variabel komite audit yaitu nilai beta sebesar – 0,113 yang artinya memiliki arah negatif terhadap ETR dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang dimana nilai signifikansi tersebut kurang dari tingkat *alpha* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan dan arah pengaruhnya positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis 2 ditolak.

4.2.5.3 Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan pada tabel 4.10, diperoleh hasil untuk variabel kualitas audit yaitu menunjukkan nilai beta sebesar $-0,025$ yang artinya memiliki arah negatif terhadap ETR dengan nilai signifikansinya sebesar $0,238$ yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih dari tingkat *alpha* $0,05$. Artinya, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan dan arah pengaruhnya positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak.

4.2.5.4 Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan pada tabel 4.10, diperoleh hasil untuk variabel pertumbuhan penjualan yaitu menunjukkan nilai beta sebesar $-0,077$ yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh negatif terhadap ETR dengan nilai signifikansinya sebesar $0,013$ yang dimana nilai signifikansi tersebut kurang dari tingkat *alpha* $0,05$. Artinya, pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis 4 diterima.

4.2.5.5 Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan pada tabel 4.10, diperoleh hasil untuk variabel *corporate social responsibility* yaitu menunjukkan nilai beta sebesar $0,155$ yang menunjukkan bahwa memberikan pengaruh positif terhadap ETR dengan nilai signifikansinya sebesar $0,002$ yang dimana nilai signifikansi tersebut kurang dari tingkat *alpha* $0,05$. Artinya, *corporate social responsibility* memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis 5 dinyatakan diterima.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, dimana informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dibanding pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan *utility*-nya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran pihak pemegang saham yaitu tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Untuk itu diperlukan penerapan mekanisme GCG yang baik. Salah satunya yaitu dengan mekanisme pengawasan melalui kepemilikan saham institusional.

Berdasarkan Ngadiman & Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Maraya & Yendrawati (2016) mengatakan semakin besar tingkat kepemilikan institusional pada komposisi pemegang saham perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin rendah. Hal demikian juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Payanti & Jati (2020) yang menyimpulkan bahwa GCG yang dilihat dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

Analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23 diperoleh hasil yaitu nilai koefisien beta kepemilikan institusional sebesar 0,083 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari tingkat alpha 0,05. Hasil

tersebut menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ETR yang merupakan proksi dari *tax avoidance* dengan nilai koefisien arah positif, yang menunjukkan semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan diikuti semakin tinggi pula nilai ETR.

Semakin tinggi nilai ETR mencerminkan semakin rendahnya tingkat *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin rendah nilai ETR memberikan gambaran tingginya tingkat *tax avoidance*. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang dibebankan oleh perusahaan dan tingkat *tax avoidance* akan semakin rendah. Artinya, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

Pemegang saham institusional merupakan investor yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi oleh perusahaan yang bersangkutan dan cenderung mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan besar proporsi saham dan hak suara yang dimiliki, pemegang saham institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan tidak merugikan keberlangsungan hidup perusahaan. Perilaku manajer dapat dikontrol dan memaksa manajer untuk hanya berfokus pada kinerja ekonomi.

Semakin tingginya kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan, menjadikan semakin meningkat juga mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap segala kebijakan yang diambil oleh manajemen, tak terlepas juga khususnya terkait masalah perpajakan. Sehingga mampu mengurangi

kemungkinan usaha untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian, maka hipotesis pertama penelitian ini yaitu kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance* diterima.

4.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa adanya asimetri informasi, dimana informasi lebih sedikit yang dimiliki pihak pemegang saham, membuatnya sulit untuk mengontrol tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Akibatnya, terkadang terdapat kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan pihak manajemen yang luput diketahui oleh pihak *principal* demi memuaskan kepentingannya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran pihak pemegang saham yaitu tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Untuk mengatasi itu diperlukan penerapan GCG yang baik. Salah satunya yaitu dengan mekanisme pengawasan melalui adanya komite audit dalam perusahaan.

Setelah dilakukan analisis SPSS *versi 23* diperoleh hasil yaitu variabel komite audit memiliki nilai koefisien beta sebesar $-0,113$ dan nilai signifikansi $0,000$. Ini menjelaskan bahwa komite audit memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap ETR. Dimana, semakin meningkatnya komite audit maka akan diikuti dengan menurunnya nilai ETR. Nilai ETR yang rendah mencerminkan tingkat *tax avoidance* yang tinggi. Dapat disimpulkan, hasil yang diperoleh yaitu komite audit memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Dewi & Jati (2014) yang mendapati hasil penelitian komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax*

avoidance. Penelitian Sunarsih & Oktavia (2016) menunjukkan hasil jumlah komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan *tax avoidance* karena semakin banyak jumlah komite audit pada perusahaan maka kualitas tata kelola perusahaan juga akan meningkat yang akan memonitor segala kegiatan manajemen dan akan meminimalisir perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*.

Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Reza (2012) dengan hasil penelitian komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil demikian juga terdapat pada penelitian Fadhilah (2014) bahwa komite audit memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Marfirah & Syam BZ (2016) diperoleh hasil yaitu pengaruh yang diberikan oleh komite audit terhadap *tax avoidance* adalah signifikan dan positif. Hasil demikian juga didapati oleh penelitian yang dilakukan Solihah et al., (2020). Terakhir, yaitu penelitian Lestari & Djoko (2022) dengan hasil penelitian komite audit berpengaruh negatif terhadap ETR yang artinya komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adanya hasil yang menunjukkan hubungan positif tersebut berdasarkan Solihah et al. (2020) bahwa keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan dan lebih cenderung menjalankan tugasnya secara netral dan tepat berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Menurut Minnick & Noga (2010) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa *corporate governance* yang semakin baik pada perusahaan akan meningkatkan aktivitas manajemen pajak yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Kualitas GCG yang semakin baik juga ditentukan oleh jumlah komite audit. Artinya, dengan adanya komite audit sebagai mekanisme penerapan GCG yang baik untuk perusahaan, mendorong pengawasan terhadap manajemen agar lebih efektif dan efisien dalam mengelola laba agar laba yang dihasilkan dapat maksimal namun dengan tidak melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dan tidak melanggar undang-undang.

Menurut Reza (2012), semakin banyaknya jumlah anggota komite audit akan meningkatkan pengawasan pada manajemen untuk mendapatkan laba yang ingin dicapai yaitu dengan cara mengefisiensikan beban. Dalam hal ini yaitu beban pajak. Dengan kompetensi dan keahlian komite audit, adanya kontribusi komite audit dalam memberikan saran-saran yang berkualitas sehubungan dengan perpajakan sehingga dapat mempengaruhi tingkat *tax avoidance*, yang menjadikan tingkat *tax avoidance* rendah. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yaitu komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.

4.3.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa adanya asimetri informasi memunculkan kekhawatiran dari pihak pemilik saham atas informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat meningkatkan

transparansi atas informasi tersebut. Penggunaan jasa auditor yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap informasi keuangan yang dilaporkan dan dipercaya dapat menyajikan nilai perusahaan yang sebenarnya dan terhindar dari kecurangan dan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Setelah dilakukan analisis *versi 23* diperoleh hasil yaitu variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien beta sebesar $-0,025$ dan nilai signifikansi sebesar $0,238$ lebih besar dari tingkat *alpha* $0,05$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa kualitas audit memberikan pengaruh negatif tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap ETR dan artinya kualitas audit tidak berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sunarsih & Oktavia (2016) yang menunjukkan hasil kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Rombbunga & Pesudo (2019) menunjukkan hasil kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* karena kualitas audit yang semakin baik membuat *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi.

Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al. (2016) dengan hasil penelitian pengaruh yang diberikan oleh kualitas audit terhadap *tax avoidance* adalah tidak signifikan. Penelitian Nugraheni & Pratomo (2018) juga mendapati hasil demikian yaitu komite audit memiliki arah pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Primasari (2019) didapatkan hasil jika pengaruh yang diberikan komite audit terhadap *tax avoidance* adalah tidak signifikan.

KAP *the big four* yang dianggap lebih berkualitas dalam melakukan audit pada laporan perusahaan dan dipercaya lebih dapat memberikan informasi yang lebih transparansi dan terhindar dari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, berdasarkan hasil yang menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ini mengartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* dan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak termasuk *the big four* dalam menangani masalah penghindaran pajak atau praktik *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan.

Menurut Rahmawati et al. (2016), hal tersebut dikarenakan Kantor Akuntan Publik baik yang termasuk *big four* maupun yang tidak termasuk, memiliki reputasi yang baik dalam melakukan audit perusahaan dan dalam melaksanakan audit berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) serta adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melaksanakan audit sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menolak hipotesis ketiga yaitu kualitas audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa luasnya informasi yang dimiliki oleh manajer menjadikannya lebih mengetahui arah dan laju pertumbuhan dari perusahaan. Manajer dapat

memperkirakan seberapa besar profit yang akan didapatkan perusahaan di masa mendatang lewat besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mengarah pada besarnya keuntungan yang akan di dapat perusahaan dan tentu terdapat peningkatan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Hal ini yang memungkinkan mendorong manajer untuk melakukan *tax avoidance*.

Sejalan dengan penelitian Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya volume penjualan, manajer akan berusaha mengelola beban pajaknya sebagai akibat dari meningkatnya laba yang berujung menimbulkan beban pajak yang lebih besar agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent*. Hasil serupa juga ditemui pada penelitian Januari & Suardhika (2019) yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Payanti & Jati (2020) juga mendapatkan hasil yang serupa bahwa pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil analisis yang dilakukan dengan SPSS *versi 23* menunjukkan hasil yaitu variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai koefisien beta bernilai negatif sebesar $-0,077$ dan nilai signifikansi $0,013$. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Kemudian, koefisien beta yang negatif menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka akan diikuti dengan nilai ETR yang semakin rendah. Semakin rendah nilai ETR mencerminkan semakin tingginya tingkat *tax avoidance*. Artinya, pengaruh yang diberikan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* adalah positif.

Dengan demikian, rasio pertumbuhan penjualan yang meningkat maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan meningkat. Peningkatan laba yang diperoleh juga akan berpengaruh pada beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan berupaya untuk menekan beban pajak yang akan mereka tanggung, sehingga manajemen akan berusaha melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, aktivitas *tax avoidance* pun menjadi meningkat. Dapat disimpulkan, bahwa hipotesis keempat diterima karena sesuai dengan hasil yang didapatkan yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*.

4.3.5 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan membutuhkan pengakuan atau legitimasi dan citra positif dari lingkungannya demi keberlangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk mendapatkan citra positif yaitu melalui aktivitas CSR. Semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat dan mendapatkan utilitas yang signifikan berupa baiknya reputasi perusahaan. Perusahaan yang menyadari pentingnya aktivitas CSR juga akan lebih peduli dan sadar akan kewajiban perpajakannya dan lebih cenderung mengurangi usahanya dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat merusak citranya.

Berdasarkan Ratmono & Winarti (2015) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR. Penelitian Dharma & Noviani (2017) mengatakan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan,

maka praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin rendah. Hal demikian juga terjadi pada penelitian Januari & Suardhika (2019) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* karena tingkat CSR perusahaan yang tinggi akan menekan tingkat *tax avoidance*.

Setelah dilakukan analisis dengan SPSS *versi* 23 diperoleh hasil yaitu nilai koefisien beta *corporate social responsibility* (CSR) sebesar 0,155 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari tingkat *alpha* 0,05. Hasil tersebut menunjukkan CSR berpengaruh terhadap ETR yang merupakan proksi dari *tax avoidance* dengan arah koefisien yang positif, dimana ini menunjukkan semakin tinggi tingkat CSR perusahaan maka akan diikuti semakin meningkatnya nilai ETR yang artinya tingkat *tax avoidance* akan semakin rendah (hubungan berkebalikan antara ETR dengan *tax avoidance*).

Perusahaan berharap dengan semakin tinggi aktivitas CSR yang dilakukan dapat memenuhi harapan dan semakin tinggi memperoleh legitimasi di lingkungan sosial masyarakat. Semakin banyak aktivitas - aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan sebagaimana bentuk usaha pertanggungjawaban sosialnya atas aktivitas operasinya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat cenderung semakin tinggi juga sikap tanggung jawab perusahaan dan dapat dicerminkan dengan kepatuhan perusahaan dalam urusan perpajakannya dan tidak melakukan tindakan-tindakan penghindaran pajak *tax avoidance*.

Menurut Januari & Suardhika (2019), perusahaan akan mendapat legitimasi dari masyarakat dengan mengungkapkan aktivitas CSR yang telah dilakukan dan melakukan pembayaran pajak melalui pemerintah dengan jumlah yang telah

ditentukan. Perusahaan yang telah melakukan banyak usaha CSR untuk mendapatkan legitimasi dan citra positif dari masyarakat demi keberlangsungan usahanya cenderung tidak akan merusak citranya seperti dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Legitimasi yang telah didapatkan dengan usaha CSR menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Inilah yang menekan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis tersebut penelitian ini mendukung teori legitimasi. Dengan demikian, maka hipotesis kelima yaitu *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance* diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI dalam sektor pertambangan tahun 2014-2020. Dengan jumlah sampel sebanyak 63 sampel.
2. Kepemilikan institusional memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan penerapan mekanisme GCG dalam hal pengawasan sehingga dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.
3. Komite audit memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam menekan praktik *tax avoidance*.
4. Kualitas audit memberikan pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* dan KAP yang tidak termasuk *the big four* dalam menangani masalah praktik *tax avoidance* pada perusahaan.
5. Pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, meningkatnya pertumbuhan penjualan perusahaan akan mengarah pada laba perusahaan yang akan meningkat,

beban pajak yang akan ditanggung juga akan meningkat, ini akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan *tax avoidance*.

6. *Corporate social responsibility* (CSR) memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang telah melakukan banyak usaha CSR untuk mendapatkan legitimasi dan citra positif dari masyarakat demi keberlangsungan usahanya cenderung tidak akan merusak citranya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan penulis, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menggunakan pengukuran lain selain ETR untuk mengukur praktik *tax avoidance* seperti *current ETR* yang mana mengukurnya berdasarkan beban pajak kini perusahaan yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk dapat menambahkan variabel lain dalam melihat mekanisme pengawasan GCG yang mana pada penelitian ini hanya memfokuskan pada yang sifatnya eksternal, baik untuk menambahkan juga mekanisme GCG yang sifatnya internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95–189.
- CNCB, I. (2020). *Duh! Jauh dari Target, Penerimaan Pajak 2019 Kurang Rp 245 T*. Cncb. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108124140-4-128523/duh-jauh-dari-target-penerimaan-pajak-2019-kurang-rp-245-t>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 171–189.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Dewinta, I. A. rosa, & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 14(3), 1584–1613. <http://dspace.lib.niigatau.ac.jp/dspace/bitstream/10191/47523/2/h28ndk382.pdf>
- Dharma, N. B. S., & Noviani, N. (2017). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1760073>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Fisher, J. M. (2014). Fairer Shores: Tax havens, Tax Avoidance, and Corporate Social Responsibility. *Boston University Law Review*, 94, 337–365.
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). Alat Analisis Data; Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial. In *CV. Andi Offset*.

- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 83–96.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Januari, D. M. D., & Suardhika, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Sales Growth , dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27, 1653–1677.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Katadata. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Katadata.
- Kemenkeu. (2016). *Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lestari, P. N., & Djoko, W. (2022). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 216–230. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.642>
- Lisa, O. (2012). Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan Dalam Hubungan Keagenan. *Jurnal WIGA*, 2(1), 42–49.
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karateristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 732–742.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan

Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>

Marfirah, D., & Syam BZ, F. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 91–102. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/814>

Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>

MUC Global. (2020). *Terendah Dalam 10 Tahun, Penerimaan Pajak 2019 Hanya Tumbuh 1,4%*. <https://mucglobal.com/index.php/id/news/1855/terendah-dalam-10-tahun-penerimaan-pajak-2019-hanya-tumbuh-14>

Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014a). Kepemilikan institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(03), 408–421.

Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014b). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(03), 408–421.

Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2227.

Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XV(30), 13–14.

Pajakku. (2019). *Pajak dan Pertumbuhan*.

Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 30(5), 1866–1885.

Pitaloka, S., & Merkusyawati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1202. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>

Pradnyadari, I. D. A. I., & Rohman, A. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap*

Agresivitas Pajak, 4(3), 668–676.

- Pratiwi, A., Nurkholis, N., & Ghofar, A. (2015). Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Asimetri Informasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 99–111. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art2>
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–19.
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 2016.
- Ratmono, D., & Winarti, M. S. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Jurnal Nominal*, IV(2), 16–30.
- Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*.
- Rombbunga, M., & Pesudo, D. A. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 237–255. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p237-255>
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, 1–19.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Solihah, M., Murdijaningsih, T., & Danuta, K. S. (2020). Tax Avoidance of Mining Companies From the Return on Assets, Institutional Ownership, and Audit Committee Perspectives. *Journal of Business Management Review*, 1(2), 076–089. <https://doi.org/10.47153/jbmr12.172020>
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*.
- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 923–932. <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i2.05>

- Tempo.co. (2014). *Perusahaan Tambang di Maluku Utara Nunggak Pajak*. Tempo.Co.
- Widarjo, W., & Setiawan, D. (2009). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress Perusahaan Otomotif. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 11(2), 107–119.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Objek Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
3.	ELSA	Elnusa Tbk.
4.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
5.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
6.	MYOH	Samindo Resources Tbk.
7.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
8.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
9.	TOBA	PT. TBS Energi Utama Tbk.

Lampiran 2. Lembar Pengukuran CSR dengan Indeks GRI G4 91 Item

NO	Kode	Indikator	Skor
KATEGORI: EKONOMI			
Aspek: Kinerja Ekonomi			
1	G4-EC1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke peyedia modal pemerintah	
2	G4-EC2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.	
3	G4-EC3	Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.	
4	G4-EC4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah	
Aspek: Keberadaan di Pasar			
5	G4-EC5	Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.	
6	G4-EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan	
Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung			
7	G4-EC7	Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan.	
8	G4-EC8	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak.	
Aspek: Praktik Pengadaan			
9	G4-EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan.	
KATEGORI: LINGKUNGAN			
Aspek: Bahan			
10	G4-EN1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran .	
11	G4-EN2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan	
Aspek: Energi			
12	G4-EN3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama dari luar organisasi	
13	G4-EN4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.	
14	G4-EN5	Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi	

15	G4-EN6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber gaya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.	
16	G4-EN7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.	
Aspek: Air			
17	G4-EN8	Total pemakaian air dari sumbernya	
18	G4-EN9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air.	
19	G4-EN10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali	
Aspek: Keanekaragaman Hayati			
20	G4-EN11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, di kelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi.	
21	G4-EN12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada diwilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.	
22	G4-EN13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali	
23	G4-EN14	Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan.	
Aspek: Emisi			
24	G4-EN15	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.	
25	G4-EN16	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.	
26	G4-EN17	Emisi gas rumah kaca lainnya	
27	G4-EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca	
28	G4-EN19	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.	
29	G4-EN20	Emisi bahan perusak ozon	
30	G4-EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya	
Aspek: Efluen dan Limbah			
31	G4-EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan	
32	G4-EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	
33	G4-EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan	

34	G4-EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel2 lampiran i, ii, iii, dan viii yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional	
35	G4-EN26	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan .	
Aspek: Produk dan Jasa			
36	G4-EN27	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.	
37	G4-EN28	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan katagori.	
Aspek: Kepatuhan			
38	G4-EN29	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.	
Aspek: Transportasi			
39	G4-EN30	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yng digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.	
Aspek: Lain-lain			
40	G4-EN31	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasakan jenis kegiatan.	
Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan			
41	G4-EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan	
42	G4-EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan			
43	G4-EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi	
KATEGORI: SOSIAL			
Aspek: Kepegawaian			
44	G4-LA1	Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarjkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area.	
45	G4-LA2	Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap	
46	G4-LA3	Laporkan jumlah total karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan	
Aspek: Hubungan Industrial			
47	G4-LA4	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama	
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja			

48	G4-LA5	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.	
49	G4-LA6	Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area.	
50	G4-LA7	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.	
51	G4-LA8	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian serikat pekerja	
Aspek: Pelatihan dan Pendidikan			
52	G4-LA9	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya , setiap pegawai berdasarkan katagori pegawai	
53	G4-LA10	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan memmbantu mereka untuk terus berkarya.	
54	G4-LA11	Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma dan perkembangan mereka secara berkala.	
Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang			
55	G4-LA12	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekargaman lainnya.	
Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki			
56	G4-LA13	Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori pegawai.	
Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan			
57	G4-LA14	Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.	
58	G4-LA15	Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan	
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan			
59	G4-LA16	Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan melalui mekanisme resmi	
KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA			
Aspek: Investasi			
60	G4-HR1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asai manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.	
61	G4-HR2	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait denagn aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.	
Aspek: Non-diskriminasi			
62	G4-HR3	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil	

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama			
63	G4-HR4	Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.	
Aspek: Pekerja Anak			
64	G4-HR5	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak	
Aspek: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja			
65	G4-HR6	Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan semua bentuk pekerja paksa atau wajib kerja	
Aspek: Praktik Pengamanan			
66	G4-HR7	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja.	
Aspek: Hak Adat			
67	G4-HR8	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.	
Aspek: Asesmen			
68	G4-HR9	Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang merupakan subyek untuk dilakukan revidu atau asesmen dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara.	
Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia			
69	G4-HR10	Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.	
70	G4-HR11	Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negatif	
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia			
71	G4-HR12	Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan melalui mekanisme resmi	
KATEGORI: MASYARAKAT			
72	G4-SO1	Laporkan persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan	
73	G4-SO2	Laporkan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal	
74	G4-SO3	Persentase dan total jumlah unit usahayang dianalisa memiliki risiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi	
75	G4-SO4	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait Anti-korupsi	
76	G4-SO5	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan dan korupsi	
77	G4-SO6	Laporkan total nilai moneter dari kontribusi politik secara finansial dan non-finansial yang dilakukan	

78	G4-SO7	Laporkan jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau diselesaikan selama periode pelaporan terkait dengan anti persaingan dan pelanggaran undang-undang anti-trust dan monopoli yang organisasi teridentifikasi ikut serta	
79	G4-SO8	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.	
80	G4-SO9	Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat	
81	G4-SO10	Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.	
82	G4-SO11	Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan melalui mekanisme resmi	
KATEGORI: TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK			
83	G4-PR1	Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampak kesehatan dan keselamatannya	
84	G4-PR2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	
85	G4-PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.	
86	G4-PR4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	
87	G4-PR5	Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.	
88	G4-PR6	Penjualan produk yang dilarang	
89	G4-PR7	Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.	
90	G4-PR8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.	
91	G4-PR9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa	

Lampiran 3. Lembar Pengukuran CSR dengan Indeks GRI *Standars* (2016)

NO	Kode	Indikator	Skor
Pengungkapan Topik Spesifik			
GRI 200 Topik Ekonomi			
GRI 201: Kinerja Ekonomi			
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	
GRI 202: Keberadaan Pasar			
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung			
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	
GRI 204: Praktik Pengadaan			
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	
GRI 205: Anti-Korupsi			
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	
GRI 206: Perilaku Anti-Persaingan			
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti- persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	
GRI 300 Topik Lingkungan			
GRI 301: Material			
14	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	
15	302-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	
16	303-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	
GRI 302: Energi			
17	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	
18	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	
19	302-3	Intensitas energi	
20	302-4	Pengurangan konsumsi energi	
21	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	

GRI 303: Air			
22	303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber	
23	303-2	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air	
24	303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali	
GRI 304: Keanekaragaman Hayati			
25	304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	
26	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	
27	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	
28	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	
GRI 305: Emisi			
29	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	
30	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	
31	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	
32	305-4	Intensitas emisi GRK	
33	305-5	Pengurangan emisi GRK	
34	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	
35	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara yang signifikan lainnya	
GRI 306: Air Limbah (Efluen) Dan Limbah			
36	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	
37	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	
38	306-3	Tumpahan yang signifikan	
39	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	
40	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan	
GRI 307: Kepatuhan Lingkungan			
41	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok			
42	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	
43	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	
GRI 400 Topik Spesial			
GRI 401: Kepegawaian			
44	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	
45	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	

46	401-3	Cuti melahirkan	
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen			
47	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	
GRI 403: Kesehatan Dan Keselamatan Kerja			
48	403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan	
49	403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan	
50	403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka	
51	403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh	
GRI 404: Pelatihan Dan Pendidikan			
52	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	
53	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	
54	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	
GRI 405: Keanekaragaman Dan Kesempatan Setara			
55	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	
56	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	
GRI 406: Non-Diskriminasi			
57	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	
GRI 407: Kebebasan Berserikat Dan Perundingan Kolektif			
58	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	
GRI 408: Pekerja Anak			
59	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	
GRI 409: Kerja Paksa Atau Wajib Kerja			
60	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	
GRI 410: Praktik Keamanan			
61	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	
GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat			
62	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	
GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia			
63	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	
64	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	
65	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang	

		telah melalui penyaringan hak asasi	
GRI 413: Masyarakat Lokal			
66	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	
67	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok			
68	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	
69	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	
GRI 415: Kebijakan Publik			
70	415-1	Kontribusi politik	
GRI 416: Kesehatan Dan Keselamatan Pelanggan			
71	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	
72	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	
GRI 417: Pemasaran Dan Pelabelan			
73	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	
74	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa	
75	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	
GRI 418: Privasi Pelanggan			
76	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	
GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi			
77	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	

Lampiran 4. Tabulasi Data Penelitian

Kode Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Institusional (X1)	Komite Audit (X2)	Kualitas Audit (X3)	Pertumbuhan Penjualan (X4)	CSR (X5)	ETR (Y)
ADRO	2014	0,9507	3	1	0,0331	0,4396	0,4359
BSSR	2014	0,9406	2	0	0,3235	0,4396	0,5119
ELSA	2014	0,6786	4	1	0,0266	0,5055	0,2530
ITMG	2014	0,8035	3	1	- 0,0900	0,4615	0,2359
MBAP	2014	0,1534	3	1	0,1364	0,1648	0,2065
MYOH	2014	0,2135	3	1	0,2315	0,2527	0,2567
PTBA	2014	0,9779	4	1	0,1667	0,1868	0,2251
RUIS	2014	0,8770	3	0	0,0204	0,1868	0,2759
TOBA	2014	0,7869	3	1	0,2096	0,2747	0,3358
ADRO	2015	0,1992	3	1	-0,1048	0,4396	0,4607
BSSR	2015	0,2600	3	0	0,3230	0,2418	0,2770
ELSA	2015	0,6833	4	1	-0,1056	0,4725	0,2521
ITMG	2015	0,7018	3	1	-0,0927	0,4396	0,5474
MBAP	2015	0,1552	3	1	0,8862	0,1758	0,2684
MYOH	2015	0,2135	3	1	-0,0138	0,2527	0,2614
PTBA	2015	0,1728	4	1	0,0501	0,7143	0,2353
RUIS	2015	0,8938	3	0	-0,1282	0,1758	0,3338
TOBA	2015	0,7869	3	1	-0,2267	0,3077	0,3423
ADRO	2016	0,9704	3	1	-0,0842	0,4725	0,3766
BSSR	2016	0,2600	3	0	-0,0878	0,2637	0,2296
ITMG	2016	0,9452	3	1	-0,1620	0,5824	0,3192
MYOH	2016	0,2135	3	1	-0,2989	0,3846	0,2782
PTBA	2016	0,1728	3	1	0,0154	0,7033	0,2494
TOBA	2016	0,7988	3	1	-0,2785	0,3077	0,4386
ELSA	2016	0,5600	3	1	-0,0410	0,2967	0,2444
RUIS	2016	0,8804	3	0	-0,1768	0,8352	0,5091
MBAP	2016	0,5726	3	1	-0,0260	0,1758	0,2504
ADRO	2017	0,9570	3	1	0,3016	0,5385	0,4229
BSSR	2017	0,9375	3	0	0,7441	0,2637	0,2585
ITMG	2017	0,3337	3	1	0,2458	0,1558	0,3020
MYOH	2017	0,8105	3	1	-0,0025	0,3846	0,2768
RUIS	2017	0,9508	3	0	-0,1448	0,3077	0,4356
PTBA	2017	0,0533	3	1	0,3850	0,7473	0,2634
TOBA	2017	0,8326	3	1	0,2131	0,3077	0,3127
ELSA	2017	0,5600	3	1	0,3752	0,2078	0,2317
MBAP	2017	0,9000	3	1	0,3932	0,1868	0,2552
ADRO	2018	0,9448	3	1	0,1874	0,5385	0,4183
BSSR	2018	0,3562	3	0	0,1296	0,3846	0,2602
ELSA	2018	0,3575	3	1	0,3305	0,0649	0,2146
ITMG	2018	0,3811	3	1	0,2701	0,1299	0,2956
MBAP	2018	0,9000	3	1	0,0670	0,1868	0,2560
MYOH	2018	0,7879	3	1	0,3703	0,4615	0,2538
PTBA	2018	0,8952	4	1	0,0871	0,7013	0,2468

Disambung ke halaman berikutnya

Lampiran 4. Sambungan

Kode Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Institusional (X1)	Komite Audit (X2)	Kualitas Audit (X3)	Pertumbuhan Penjualan (X4)	CSR (X5)	ETR (Y)
RUIS	2018	0,9302	3	0	0,1538	0,3846	0,3931
TOBA	2018	0,8326	3	1	0,5083	0,3516	0,3001
ADRO	2019	0,7824	3	1	-0,0832	0,7013	0,4183
BSSR	2019	0,1848	3	0	-0,0949	0,3846	0,2626
ITMG	2019	0,9329	3	1	-0,1797	0,2727	0,3195
MYOH	2019	0,7972	3	1	0,0131	0,4615	0,2527
PTBA	2019	0,9451	4	1	0,0293	0,5844	0,2593
TOBA	2019	0,9552	3	1	0,1506	0,3516	0,3042
ELSA	2019	0,5600	3	1	0,2657	0,0649	0,2363
RUIS	2019	0,9000	3	0	0,2298	0,4615	0,3468
MBAP	2019	0,9429	3	1	-0,0300	0,1758	0,2715
ADRO	2020	0,5600	3	1	-0,2560	0,7143	0,2865
BSSR	2020	0,0958	3	0	-0,1956	0,2088	0,2527
ITMG	2020	0,8367	3	1	-0,9182	0,3377	0,4786
MYOH	2020	0,8063	3	1	-0,3083	0,4615	0,2232
PTBA	2020	0,9041	4	1	-0,2048	0,7662	0,2549
TOBA	2020	0,9553	3	1	0,9308	0,1948	0,1492
ELSA	2020	0,8000	3	1	-0,0785	0,1169	0,2778
RUIS	2020	0,9000	3	0	0,0125	0,4505	0,4272
MBAP	2020	0,9434	3	1	-0,2173	0,1868	0,2651

Lampiran 5. Output Hasil Analisis SPSS versi 23

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	63	.0533	.9779	.672154	.2991002
KOA	63	2	4	3.10	.346
SG	63	-.9182	.9308	.066438	.2922077
CSR	63	.0649	.8352	.370693	.1902664
ETR	63	.1492	.5474	.306264	.0860948
Valid N (listwise)	63				

KUA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	14	22.2	22.2	22.2
1	49	77.8	77.8	100.0
Total	63	100.0	100.0	

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06388924
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.049
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670 ^a	.449	.401	.0666325	1.916

a. Predictors: (Constant), CSR, KUA, KI, SG, KOA

b. Dependent Variable: ETR

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.137	.045		3.025	.004		
KI	.000	.016	-.002	-.019	.985	.989	1.011
KOA	-.039	.015	-.333	-2.517	.150	.841	1.188
KUA	.016	.012	.173	1.370	.176	.931	1.074
SG	-.020	.017	-.147	-1.169	.247	.939	1.065
CSR	.055	.028	.260	1.976	.530	.856	1.169

a. Dependent Variable: ABS_RES

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.566	.079		7.174	.000		
KI	.083	.028	.288	2.910	.005	.989	1.011
KOA	-.113	.027	-.453	-4.225	.000	.841	1.188
KUA	-.025	.021	-.122	-1.194	.238	.931	1.074
SG	-.077	.030	-.260	-2.564	.013	.939	1.065
CSR	.155	.048	.343	3.228	.002	.856	1.169

a. Dependent Variable: ETR

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670 ^a	.449	.401	.0666325	1.916

a. Predictors: (Constant), CSR, KUA, KI, SG, KOA

b. Dependent Variable: ETR

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.206	5	.041	9.302	.000 ^b
	Residual	.253	57	.004		
	Total	.460	62			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), CSR, KUA, KI, SG, KOA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.566	.079		7.174	.000		
KI	.083	.028	.288	2.910	.005	.989	1.011
KOA	-.113	.027	-.453	-4.225	.000	.841	1.188
KUA	-.025	.021	-.122	-1.194	.238	.931	1.074
SG	-.077	.030	-.260	-2.564	.013	.939	1.065
CSR	.155	.048	.343	3.228	.002	.856	1.169

a. Dependent Variable: ETR